

**POLITIK KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KABUPATEN DEMAK**

**(Studi Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung  
Tahun 2019)**

**SKRIPSI**

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

**WAWAN SULISTIYONO  
1506016005**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik  
UIN Walisongo Semarang  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Wawan Sulistiyono  
NIM : 1506016005  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Politik Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak  
(Studi Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung  
Tahun 2019)

Dengan ini telah disetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi



Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag  
NIP : 197303142001121001  
Tanggal: 22 November 2019

Semarang, 27 Desember 2019  
Pembimbing,  
Bidang Metodologi & Tata Tulis



Sholkhah Mufrikah, M.Si  
NIP : -  
Tanggal: 26 Desember 2019

PENGESAHAN

**SKRIPSI**

**POLITIK KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN**

**DEMAK**

**(Studi Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung Tahun  
2019)**

Disusun Oleh:

**Wawan Sulistiyono**

1506016005

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 2 Juli 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



H. Amin Farih, M.Ag

NIP. 197106142000031002

Penguji III



H. Adib, S.Ag., M.Si

NIP. 197303202002121002

Pembimbing I



Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

NIP. 197303142001121001

Sekretaris/Penguji II



Sholikhah Mufrikah, M.Si

NIP. -

Penguji IV



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 196805051995031002

Pembimbing II



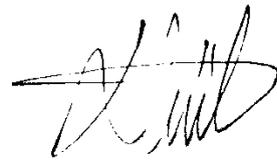
Sholikhah Mufrikah, M.Si

NIP. -

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 23 Juni 2020



Wawan Sulistiyono

1506016005

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “POLITIK KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK (Studi Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung Tahun 2019)”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dalam pelaksanaan penulisan skripsi penulis.
3. H. Adib, S.Ag, M.Si dan Bapak Muhammad Mahsun, M.A selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.

4. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag dan Ibu Solkhah Mufrikah, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sabar dan tulus dalam memberi masukan maupun arahan, menuntun, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Demak yang telah membantu penulis memberikan informasi untuk memberikan data.
8. Bapak Musafak selaku Koordinator PKH Kabupaten Demak yang telah membantu penulis memberikan informasi untuk memberikan data.
9. Bapak Budi Wahyono selaku Koordinator PKH Kecamatan Sayung yang telah membantu penulis memberikan informasi untuk memberikan data.
10. Ibu Any Sulistiyowati selaku pendamping PKH di Desa Sodong, dan seluruh masyarakat Kelurahan Sidogemah yang telah membantu memberikan informasi untuk memberikan data.
11. Yang tercinta orang tua penulis Ayah Daryono dan ibu CH. Yumiyati yang menyayangi, mendo'akan setulus hati serta memberikan keridhoan agar sukses dalam menyusun skripsi ini.
12. Ambarwati, Satiastuti dan Satiyawati kakak-kakakku tercinta yang mendorongku untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan Ilmu Politik angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang dalam bangku kuliah dan selalu memberi masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Posko 25 KKN Wonolopo, Mijen (Fahmi, ucil, Azmi, Arman, Asman, Ajang, Arum, Irna, narti, nina, kafid, lintang, erlin, fanda) yang telah mendukung dan memberikan semangat penulis.

15. Sahabat main bareng bagus, dika, adib, lia, labib yang telah mendukung dan memberikan semangat penulis.
16. Nur Fita Indah Lestari yang telah setia menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan bantuan baik secara material atau non material yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua, penulis mengucapkan *jazakumullah ahsanal jaza'*, *wa jazakumullah khairan katsiran*. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta kesalahan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Aamiin

## PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan serta menjadi penyemangat penulis selama ini.

Kakak-kakakku yang selalu memberi dukungan dan perhatian serta menjadi penyemangat penulis selama ini.

Almamater penulis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang.

Guru penulis dari penulis lahir sampai sekarang.

## MOTTO

### “Jangan takut untuk berbeda dari yang lain”

Jangan takut berbeda, takutlah jika kamu sama seperti orang lain. Untuk menjalankan kehidupan kita harus punya jalan tujuan masing-masing, jangan mengikuti arus dari kebanyakan orang, karena kita sendiri yang mampu mengubah nasib kehidupan diri sendiri, bukan orang lain. Ikutilah kata hatimu sendiri karena itulah yang membedakan dirimu dengan orang lain (Wawan Sulistiyono).

## ABSTRAK

Kebijakan publik sering dipahami sebagai instrumen yang dipakai pemerintah untuk memecahkan masalah publik secara teknokratis. Dalam arti pemerintah menggunakan pendekatan rational choice untuk memilih alternatif terbaik guna memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan social ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Program Keluarga Harapan hadir di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak sejak tahun 2012, alasan penulis meneliti di Kecamatan Sayung yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan program keluarga harapan. bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Sayung dan bagaimana dampak Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sayung.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu sebuah penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Hasil penelitian ini adalah program PKH di Kecamatan Sayung sudah terlaksana dengan baik. Masyarakat penerima mengatakan PKH membantu dalam perekonomian mereka. Setelah berjalannya PKH, masalah perekonomian sedikit teratasi. Terutama dalam bidang pendidikan masyarakat merasa tertolong karena mendapat bantuan, uang yang semula dianggarkan ke pendidikan masih bisa digunakan untuk keperluan lainnya.

Kata kunci : Kebijakan, implementasi PKH, Dampak Program Keluarga Harapan.

## ABSTRACT

Public policy is often understood as an instrument used by the government to solve technocratic public problems. In a sense the government uses a rational choice approach to choose the best alternative to solve the problems faced by the community. Poverty is a development problem in various fields marked by unemployment, underdevelopment, and deterioration. The poor are generally weak in their ability to do business and have limited access to socio-economic activities, so that they are left behind by other groups of people who have higher potential.

The Family of Hope program has been present in Sayung Sub-District, Demak Regency since 2012, the reason the author studied in the District of Sayung is to find out what is meant by the Family of Hope program. How the effectiveness of the Hope Family Program in poverty alleviation in Sayung District and how the impact of the Hope Family Program in Sayung District.

The research method that I use is a qualitative method with a case study approach that is a study in which the researcher explores a particular phenomenon (case) in a given time and activity (program, event, process, institution or social group) and collects detailed and in-depth information using various data collection procedures for a certain period.

The results of this study are the PKH (Family of Hope Program) program in Sayung Sub district that has been implemented well. The recipient community said the PKH (Family of Hope program) assistance helped in their economy. After the aid program began, the economic problem was slightly resolved. Especially in the field of education the community felt helped because they got help, the money originally budgeted for education could still be used for other purposes.

Keywords: Policy, implementation of the Family of Hope Program, Impact of the Family of Hope Program.

## ملخص

تعاملا لكاشملا لحا تموكحلا اهمدختست ةادأ اهنأ ىلء تعاملا ةسايسلا مهفت ام ابلغا لحا ليدب ل ضفأ رايئخلا ىنلاقعلا رايئخلا جهنء تموكحلا مدختست ، ام ىنعجب . تيطار قونكتلا فلختلاو ةلأطبلا بزيمتت ةفلتختم تلاجم ىف ةيومنت ةلكشم رقفلا . عمتجملا اهجواو ىنلا لكاشملا مهيدلو تيراجتلا لامعلا ةسرامم ىلء مهتردق ىف ماء لكشب نوفيعض ءارقلا . روهدتلاو لبق نم مهءارو مهكرت متي ثيحب ، ةيداصتقلاا ةيعامتجلاا ةطشنلأا ىلء دودحم لوصو ىلء اتانكلم مهيدل نيذلا سانلا نم ىرخأ تاعومجم

ماء ذنم ةنيدم ىلتالابو ، تيعرفلا زيزعلا ةقطنم ىف دوجوم لملا ةرسا جمانرب فيك . لم ةرسا جمانرب دوصقملا ةفرعم وه زيزعلا ةقطنم ىف فالوملا مسرد ىذلا ببسلاو ةرسا جمانرب رثا فيكو غنوياس ةقطنم ىف رقفلا ةدح نم فيفختلا ىف لملا ةرسا جمانرب تيلاعف . غنوياس ةقطنم ىف لملا

ءسارد ىف هو ةلاد ءسارد جهنم تيعون ءقيرط ىف ه اهمدختسا ىنلا ثحبلا ءقيرط ءيلمء وأ ثدح وأ جمانرب ( نيعم طاشنو تقو ىف ءنيعم ) ءلادح ( ءرهاظ نوئحابلا اهيف فشكتسي تاءارجا مادختساب ءمعمو ءيليفت تامولعم نوعمجيو ) ءيعامتجا ءعومجم وأ ءسسؤم وأ ءنيعم ءرقل ءفلتخملا تانايبلا عمج .

لكشب هذيفنت مءدق غنوياس ءقطنم ىف لملا ةرسا جمانرب نأ ىف ه ءساردلا هذء جئاتن جمانرب ليغشت دعب . اهداصتقا ىف دعاسي ىلئاعلا لملا جمانرب نأ ءيقلتملا تاعمتجملا لوقت . ديج رعش ىذلا ميلعتلا لاجم ىف ءصاخ . ءلايلق ءيداصتقلاا تلاكشملا لء مءي ، ءرسلا تاعقوت مادختسا نكمملا نم لازيلا ، ءدعاسملا ىلء اولصد مهذلا ءدعاسملا ىلء لصد هئا عمتجملا . ىرخأ ضارغلا ميلعتلا ءينازيملا ىف ءصخملا لاولملا

ىلئاعلا لملا جمانرب ريئآت ، ىلئاعلا لملا جمانرب ذيفنت ، ءسايسلا : ءيحاتفملا تاملكلا

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	4
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II PRINSIP KEBIJAKAN, KONSEP KEMISKINAN, KESEJAHTERAAN dan BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)</b>	
A. Kebijakan Publik .....	15
1. Pengertian Kebijakan .....	15
2. Tahap Pembuatan Kebijakan .....	15
B. Konsep Kemiskinan .....	17
1. Pengertian Kemiskinan .....	17
2. Bentuk Kemiskinan.....	19
3. Perengkap Kemiskinan.....	20
4. Ciri dan Dampak Kemiskinan .....	22

C. Konsep Kesejahteraan .....	23
1. Pengertian Kesejahteraan .....	23
2. Indikator Kesejahteraan.....	23
D. Program Keluarga Harapan (PKH).....	26
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH).....	26
2. Tujuan, Sasaran, dan Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) .....	27
3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) .....	29
4. Informasi bantuan Program Keluarga Harapan .....	30

### **BAB III LANSKAP KECAMATAN SAYUNG**

A. Gambaran Umum Kecamatan Sayung .....	33
1. Sejarah Terbentuk .....	33
a. Kondisi Geografi.....	35
b. Jumlah Penduduk .....	38
c. Tingkat Pendidikan .....	39
d. Infrastruktur Kecamatan Sayung .....	41
e. Ragam Pekerjaan.....	41
2. Kondisi Ekonomi Kecamatan Sayung .....	43

### **BAB IV KEBIJAKAN POLITIK DAN ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SAYUNG**

A. Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung pada tahun 2019 .....	45
B. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung tahun 2019 .....	54
C. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung pada tahun 2019 .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Jumlah Penduduk.....	38
Tabel 2	Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	40
Tabel 3	Jenis dan Mata Pencaharian Masyarakat.....	42
Tabel 4	Jumlah panen dan produksi tani .....	43
Tabel 5	Jumlah Penerima PKH tahap 1 .....	49
Tabel 6	Jumlah Penerima PKH tahap 2.....	50
Tabel 7	Jumlah Penerima PKH tahap 3.....	51
Tabel 8	Jumlah Penerima PKH tahap 4.....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Struktur Organisasi Kecamatan Sayung.....	35
Gambar 2	Peta Kecamatan Sayung .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip hasil Wawancara dengan Narasumber 1
Lampiran 2	Transkrip hasil Wawancara dengan Narasumber 2
Lampiran 3	Transkrip hasil Wawancara dengan Narasumber 3
Lampiran 4	Transkrip hasil Wawancara dengan Narasumber 4
Lampiran 5	Foto Bersama Narasumber 1
Lampiran 6	Foto Bersama Narasumber 2
Lampiran 7	Foto Bersama Narasumber 3
Lampiran 8	Foto Bersama Narasumber 4
Lampiran 9	Foto Rumah Penerima Bantuan PKH
Lampiran 10	Foto Kantor Kecamatan Sayung

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan publik sering dipahami sebagai instrumen yang dipakai pemerintah untuk memecahkan masalah publik secara teknokratis. Dalam arti pemerintah menggunakan pendekatan *rational choice* untuk memilih alternatif terbaik guna memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Akan tetapi kebijakan publik pada dasarnya juga merupakan produk politik. Sebagai sebuah produk politik perumusan kebijakan dilakukan dengan menempuh proses yang panjang, kompleks dan sering melibatkan rivalitas. Rivalitas, bahkan konflik sering terjadi karena dalam proses panjang tersebut formulasi kebijakan juga melibatkan banyak aktor dengan beragam kepentingan masing-masing. Dan tentu juga masing-masing pihak sangat ingin kepentingan dirinya atau kelompoknya yang diakomodasi. Mudah diduga, karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan, maka formulasi kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai proses politik yang dalam praktiknya melibatkan factor-faktor yang dinamis. (Indiahono 2017:9).

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan social ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan menghambat tercapainya demokrasi, keadilan dan persatuan. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. (Adisasmita 2015:56).

Pemerintahan era Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah program PKH (Program Keluarga Harapan) Sebagai program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka

akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia (Kemsos.go.id).

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. (Jogloabang.com)

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah, Kabupaten ini berbatasan dengan laut jawa di barat, Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten Grobogan di tenggara, serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Kabupaten Demak memiliki luas 897,43 km<sup>2</sup> dan berpenduduk 1.055.579 jiwa (2010). Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 6°43'26" - 7°09'43" LS dan 110°48'47" BT dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Demak dilalui jalan

negara (pantura) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya-Banyuwangi.

Kabupaten Demak terdiri atas 14 kecamatan yaitu Kecamatan Demak, Wonosalam, Karangtengah, Bonang, Wedung, Mijen, Karanganyar, Gajah, Dempet, Guntur, Sayung, Mranggen, Karangawen dan Kebonagung, yang dibagi lagi atas sejumlah 249 desa dan kelurahan terdiri dari 243 desa dan 6 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Demak. (ig.Wikipedia.org).

Data kemiskinan Kabupaten Demak pada tahun 2017 Sebanyak 152.60 kepala keluarga (KK) dengan presentase kemiskinan 13.41%, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 144.10 kepala keluarga (KK) presentase kemiskinan 12.54%, tahun 2019 sebanyak 137.60 kepala keluarga (KK) dengan presentase 11.86%. (bps.go.id).

Jumlah penduduk di Kecamatan Sayung pada tahun 2018 mencapai 107.560 jiwa, sedangkan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan saying mencapai 4765 per kepala keluarga (KK). Data jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Sayung berjumlah 4765 per kepala keluarga dari berbagai desa yang ada di kecamatan Sayung. (kecamatan sayung).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung Tahun 2019?
2. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung Tahun 2019?
3. Bagaimana Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penurunan kemiskinan di Kecamatan Sayung pada Tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disampaikan dari pemerintahan sampai ke Kecamatan apakah berjalan sesuai arahan atau melenceng dari tujuan utamanya.
2. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat sekitar di Kecamatan Sayung.
3. Untuk mengetahui dampak Program Keluarga Harapan (PKH) yang di dirasakan kepada masyarakat sekitar.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan politik pemerintahan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian yang berfokus pada program penanggulangan kemiskinan dan dampak yang dirasakan masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH).

#### 2. Manfaat praktis

Secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan dan dampak yang dirasakan, agar dapat memberikan pemahaman tentang politik kebijakan public bagi masyarakat sehingga tidak terjadi lagi krisis tentang kemiskinan yang ada di bangsa ini.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian adalah sebagai bahan terhadap penelitian yang ada. Baik mengenai kelebihan maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan komparatif terhadap kajian yang terdahulu. Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas

permasalahan yang sama baik dalam bentuk skripsi, buku, dan dalam bentuk tulisan yang lainnya.

Pada penelitian ini penulis merujuk penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Frenky Argiawan Mahendra, Uin Sunan Kalijaga, program studi Interdisciplinary Islamic Studies dengan judul *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta*, terbitan tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan di desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul, Dampak dari strategi penanggulangan kemiskinan yang digunakan. Untuk mendapatkan tujuan dari penelitian ini digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yang terdiri dari perengkan desa Bleberan, pengelola desa wisata, dan warga desa Bleberan yang berjumlah 13 orang. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan desa untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan pembentukan desa wisata sehingga dapat memberikan akses dan kesempatan berwirausaha bagi masyarakat sekitar desa dan mengurangi arus urbanisasi pemuda ke kota-kota besar. Setelah munculnya desa wisata kemudian dilembagakan dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dampak strategi penanggulangan kemiskinan terlihat dengan dikenalnya desa Bleberan sebagai destinasi wisata dan banyaknya kunjungan wisata. Strategi pembentukan desa wisata ini telah melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru, namun hanya di sekitar objek wisata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Bleberan Kecamatan Playen Kecamatan Gunung Kidul masih dilakukan secara umum (general), cenderung

bersifat parsial dan masih belum dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh.

2. Skripsi yang disusun oleh Alex Kurniawan, Universitas Negeri Semarang, jurusan Ekonomi Pembangunan, fakultas Ekonomi dengan judul *Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*, terbitan tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan Kondisi keluarga miskin di Kecamatan Brangsong menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan adalah SD dengan pekerjaan tetap sebagai pedagang. Tingkat pendapatan masyarakat sebagian besar > Rp.600.000,00 setiap bulan dengan jumlah tanggungan keluarga dalam satu rumah berkisar antara 3-5 orang. Implementasi P2KP dilihat dari penilaian masyarakat mengenai P2KP, berdasarkan hasil penelitian, rata-rata sebesar 74,34% masyarakat menilai implementasi P2KP berhasil dengan adanya manfaat langsung (seperti menghemat pengeluaran untuk transportasi, menghindari kecelakaan, bermanfaat untuk kepentingan umum, dan memudahkan mengangkut hasil-hasil pertanian. Keberhasilan P2KP dalam melaksanakan programnya mencapai 51%-75%. Pelaksanaan program P2KP tertinggi adalah pembangunan MCK yang berada pada tingkat 76%-100%. MCK merupakan salah satu fasilitas yang sangat vital bagi sebuah keluarga. Keberadaan MCK yang bersih dan sehat diharapkan akan meningkatkan kesehatan masyarakat di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. sedangkan Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode area proporsional random sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah di masing-masing bagian terampil sampelnya secara acak penentuan sampel dihitung dengan rumus, pengambilan sampel sebanyak 90 kepala keluarga sudah dianggap representatif. Variabel dalam peneltiian ini adalah implementasi proyek penanggulangan

kemiskinan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase.

3. Skripsi yang disusun oleh Didin Ismoyo, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum dengan judul *Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pemerintah Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)*, terbitan tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tingginya kemiskinan di Desa Cangkol dan mengetahui tindakan yang akan dilakukan Pemerintah Desa Cangkol dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran Pemerintah Desa Cangkol dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk jenisnya menggunakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data yakni melalui wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan. Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif yakni analisis data yang tidak harus dilakukan dengan lokasi yang luas, dengan responden yang banyak, dan dengan keterangan yang banyak.
4. Skripsi yang disusun oleh Supriadi, Universitas Hasannudin, Fakultas FISIP, jurusan Ilmu Pemerintahan, dengan judul *Peran*

*Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilan Di Kota Palopo*, terbitan tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui program Khilan di Kota Palopo serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Khilan dapat dikategorisasi secara umum menjadi dua peran yaitu penumbuhan iklim usaha dan penguatan potensi atau daya usaha. Penumbuhan iklim usaha meliputi pendanaan, sarana & prasarana, informasi usaha, perizinan usaha dan promosi dagang. Sedangkan Penguatan Potensi atau Daya meliputi produksi dan pengolahan, pemasaran, serta sumber daya manusia. Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat miskin melalui program khilan di Kota Palopo meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat kurangnya inovasi dalam pemasaran dan terbatasnya anggaran yang hanya sekian persen, Sedangkan factor pendukung sumber daya manusia dan sumber daya alam melimpah.

5. Skripsi yang disusun oleh Tibyan, Universitas Sebelas Maret, Fakultas ekonomi, Program studi Pembangunan, dengan judul *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen*, terbitan tahun 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) pada peningkatan produktivitas, jumlah tenaga kerja dan penghasilan usaha Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen

Populasi dari penelitian ini adalah 240 anggota KSM yang menerima dana PNPM melalui program P2KP Kabupaten Sragen. Jumlah sampel sebanyak 48 responden yang diambil dengan teknik quota sampling. Analisis data dengan uji beda rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dapat meningkatkan produktivitas, jumlah tenaga kerja, dan penghasilan KSM yang menerima pemberian bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.

Dari kajian beberapa tinjauan pustaka di atas, peneliti berpendapat bahwa studi-studi tentang program penanggulangan kemiskinan yang ada beberapa diantaranya hanya membahas memaksimalkan kelebihan yang dimiliki desa tersebut, factor yang mempengaruhi tingginya kemiskinan di desa, program penanggulangan yang ada di kota tersebut/ program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), dan factor yang menyebabkan tingginya kemiskinan yang ada di sebuah desa. Beberapa studi di atas belum ada yang membahas bagaimana kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjalan pada Tahun 2019, implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di kecamatan sayung, serta dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penurunan kemiskinan yang ada di Kecamatan Sayung. Padahal, menurut peneliti kondisi ini kemungkinan besar memiliki peluang signifikan dalam menentukan kegagalan atau kesuksesan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini berjalan di Indonesia. Studi ini ingin mengisi kekosongan tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan dengan menempatkan fokus kajian pada implementasi yang diterapkan pihak pemerintahan di Kecamatan Sayung, serta dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penurunan kemiskinan di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian yang akan diajukan kali ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan naratif. Dengan kompleksitas yang ada dalam pendekatan kualitatif serta hasil yang fleksibel bukan sebuah hasil akhir. Maka data yang dikumpulkan berupa rangkaian kata-kata yang membentuk sebuah pernyataan dari yang sudah diteliti, gambar, bukan angka-angka yang kaku dan pasti.

Adapun pendekatan naratif yaitu menceritakan kembali, karena itu menentukan siapa yang akan menulis dan merekam cerita merupakan sebuah aspek mendasar dalam penelitian naratif, diharapkan dengan pendekatan tersebut peneliti mampu menggambarkan secara langsung realita yang terjadi di perkembangan penanggulangan kemiskinan di kecamatan Sayung. Metode kualitatif ini diharapkan mampu untuk menemukan sejauh mana sebenarnya dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan di kecamatan Sayung pada Tahun 2019.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan sesuatu yang menjadi tempat data diperoleh. Sumber data yang utama atau pokok disebut sumber data primer. Jenis data yang diperoleh adalah data primer. Sumber data pendukung atau tambahan di sebut sumber data sekunder, jenis datanya adalah data sekunder.

#### **- Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara menggali dari sumber informasi (informan) yaitu dari Kementerian Sosial Kabupaten Demak, Perangkat Kecamatan Sayung yang menangani Program Keluarga Harapan (PKH), penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan-informan dipilih dengan

mendasar pada subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data serta bersedia memberikan informasi data.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder didapatkan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2014: 225), sumber data dalam penelitian digunakan untuk mendukung data primer, yang meliputi buku-buku, riview, literature, dokumentasi, penelitian atau sumber lain yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Melalui teknik wawancara maka mendapat informasi langsung dari informan yang terdiri atas:

- a. Koordinator Dinas Sosial Kabupaten Demak yang menangani Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Koordinator Kecamatan Sayung yang menangani Program Keluarga Harapan (PKH).
- c. Masyarakat yang mendapat hak Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Observasi

Observasi adalah teknik untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi merupakan salah satu teknik yang sangat sederhana dan

tidak memerlukan keahlian yang luar biasa. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan metode observasi berperan serta atau pengamatan terlibat, yaitu pengamatan yang dilakukan sambil sedikit banyak berperan serta dalam kehidupan orang-orang yang diteliti dan memandang realitas kehidupan mereka dalam lingkungan yang biasa, rutin dan alamiah (Mulyana, 2002: 167). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dengan jalan menjadi partisipan langsung dilokasi penelitian yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa catatan yang dapat diperoleh serta dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Dokumentasi berupa pengumpulan data berupa catatan merupakan objek perolehan informasi dengan memperhatikan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place), dan orang (people). Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi, dokumentasi bias tertulis maupun lainnya yang bisa memberikan informasi tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

#### a) Analisis Data

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karena data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat dipergunakan begitu saja, analisis data menjadi bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat lebih berarti dan bermakna dalam memecahkan masalah.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Data yang direduksi memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, dengan membuat penggambaran secara deskriptif masalah yang diteliti.

#### 3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada dasarnya dan pada prinsipnya semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian adalah suatu cara untuk menyusun dan mengolah hasil penelitian dari data dan bahan yang disusun menurut urutan tertentu sehingga menjadi susunan penelitian. Sistematika penulisan

dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, inti dan bagian akhir. maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi mencakup halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bab I merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Pembahasan bab II berisi teori kebijakan publik, prinsip kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Sub bab terdiri dari kebijakan publik, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pembahasan bab III berisi tentang lanskap kecamatan Sayung. Sub bab terdiri dari gambaran umum Kecamatan Sayung dan kondisi ekonomi di Kecamatan Sayung.

Pembahasan yang tertuang bab IV berisi tentang kebijakan politik dan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung. Sub bab terdiri dari kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijalankan pemerintah daerah, Implementasi yang diterapkan di Kecamatan Sayung, dan dampak bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung.

Bab V sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir skripsi mencakup daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi tentang sumber rujukan atau referensi yang digunakan untuk penyusunan proposal penelitian. Daftar pustaka yang disusun hanya memuat sumber yang dirujuk. Dalam lampiran terdapat informasi yang diperoleh dalam penelitian yang penting dan mendukung laporan hasil penelitian, tetapi tidak bisa disajikan pada bagian utama penelitian.

## **BAB II**

### **PRINSIP KEBIJAKAN, KONSEP KEMISKINAN, KESEJAHTERAAN DAN BATUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**

#### **A. Kebijakan**

##### **1. Pengertian Kebijakan**

Pengertian kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan sebuah cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu yang membutuhkan penyelesaian. Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi (Winarno, Budi, 20014).

Karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton (Agustino, 2006) sebagai penentu dalam sistem politik yaitu: para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya. Selanjutnya Easton menyebutkan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu di mana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari yang diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu (Winarno, Budi, 20014).

##### **2. Tahap Pembuatan Kebijakan**

Tahap-tahap dalam pembuatan kebijakan publik ada 5 tahap menurut William N.Dunn(2003) adalah sebagai berikut :

#### a. Penyusunan Agenda

Penyusunan Agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.

Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan. Isu Kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William N.Dunn(1999), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

#### b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan Universitas Sumatera Utara masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

#### c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun

warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana melalui proses ini, warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

e. Penilaian / Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan (repository.usu.ac.id).

## **B. Konsep Kemiskinan**

### **1. Pengertian Kemiskinan Secara Umum**

Pada umumnya, setiap negara di dunia termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi pendidikan, kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan

pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Definisi Kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang, keluarga, komunitas, bahkan negara yang menyatakan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam

hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2004).

## **2. Bentuk Kemiskinan**

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan structural. Berikut penjelasan empat bentuk kemiskinan:

### **a. Kemiskinan absolut**

Kemiskinan absolut yaitu kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

### **b. Kemiskinan relative**

Kemiskinan relatif dilihat dari kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

### **c. Kemiskinan kultural.**

Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

### **d. Kemiskinan structural**

Kemiskinan struktural merupakan situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan ([digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)).

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah di jelaskan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mampu menumbuhkan perilaku

dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

### **3. Perangkap kemiskinan**

Skema terbentuknya kemiskinan yang didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Chambers menerangkan bagaimana kondisi yang disebut miskin di sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga adalah kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang sebagian besar ditemukan bahwa kemiskinan selalu diukur/diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, kesehatan, perumahan atau pemukiman, dan pendidikan. Rendahnya kemampuan pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk mengkonsumsi.

Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah (Nugroho, 1995: 17). Konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti:

1. Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyaki menular.
2. Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas sehingga sangat rentan terhadap resiko kematian.
3. Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan berdampak mengganggu kesehatan.

4. Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan.

Kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang dikatakan rendah atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai tingginya tingkat kematian (e-journal.uajy.ac.id)

Setelah mengenal bentuk kemiskinan berikut ini adalah jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya:

- a. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum (jalan raya, listrik, air bersih). Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

- b. Kemiskinan buatan

Adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata (todaro dan smith,2003, 247).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan bisa terjadi oleh sebab alamiah dan buatan. Seperti yang terjadi pada lokasi penelitian ini, dimana kemiskinan terjadi oleh sebab alamiah yang pada dasarnya masyarakat tersebut sudah terlahir sebagai keluarga miskin, namun yang memperparah keadaan adalah dimana masyarakat tidak mendapat sarana ekonomi secara merata.

#### **4. Ciri-ciri dan Dampak kemiskinan**

Ciri-ciri yang saat ini masih dipakai dalam menentukan kondisi miskin yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.
2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja dilingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut jugasetengah menganggur.
4. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan.
5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Selanjutnya dampak dari kemiskinan yang ada disekitar kita dan bisa kita amati yaitu:

1. Putus sekolah, tentu dampak yang sering mudah kita jumpai dari keluarga kurang mampu yaitu putus sekolah mereka yang mempunyai anak lebih memilih tidak melanjutkan pendidikan/putus sekolah karena terkendala dengan biaya oprasional sekolah. Keluarga yang kurang mampu lebih memilih anak mereka untuk diperkerjakan untuk memperoleh biaya tamabahan penghidupan, tingkat pendidikan yang rendah inilah yang membuat rantai kemiskinan sulit terputuskan.
2. Pengangguran, dari mulai sampai putus sekolah dampak selanjutnya yaitu pengangguran, masyarakat yang tidak mendapatkan ilmu akan sulit bersaing dengan masyarakat yang lain yang memperoleh pendidikan maka masyarakat kalah bersaing dan sulit mendapatkan pekerjaan sehingga angka kemiskinan juga masih sulit dikurangi.
3. Angka kriminalitas semakin meningkat, tidak dipungkiri masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan ditambah beban hidup membuat

masyarakat yang terpepet memilih jalan pintas yaitu dengan cara tidak halal seperti merampok mencuri dan lain sebagainya, sehingga membuat kejahatan semakin merabah dimana-mana, membuat masyarakat yang lain resah. Karena dampak kemiskinanlah angka kriminalitas semakin meningkat.

### **C. Konsep Kesejahteraan**

#### **1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

#### **2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa instansi pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Menurut BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.

b. Badan Pusat Statistik (BPS)

Kriteria untuk menentukan atau rumah tangga miskin seperti:

1. Luas bangunan per anggota rumah tangga/keluarga kurang dari 8 meter persegi.
2. Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah.
3. Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah.
4. Fasilitas MCK belum tersedia.
5. Sumber air minum bukan air minum bersih.
6. Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik.
7. Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang.
8. Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali.
9. Tidak mampu membeli daging /susu/ayam dalam seminggu.
10. Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumah tangga.
11. Tidak memiliki kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik.
12. Lapangan pekerjaan berupa petani, nelayan, atau pekebun.
13. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah.
14. Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp. 500.000.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera ([bps.go.id](http://bps.go.id)).

c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) membagi indikator kesejahteraan kedalam 5 (lima) tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu:

1. Tahap pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana.

## 2. Tahap sejahtera I

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak. Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Paling kurang satu kali dalam seminggu makan daging/ikan/telur.
- c. Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam satu tahun.
- d. Luas lantai rumah 8M untuk setiap penghuni rumah.
- e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat.
- f. Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- g. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin.
- h. Pasangan usia subur dengan 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.

## 3. Tahap Sejahtera II

Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator berikut:

- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang.
- c. Makan bersama paling kurang satu kali dalam seminggu untuk berkomunikasi.

- d. Mengikuti kegiatan masyarakat.
  - e. Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV dan majalah.
4. Tahap sejahtera III
- Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:
- a. Memberikan sumbangan materil secara teratur.
  - b. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
5. Tahap sejahtera III plus

Keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang dapat memenuhi semua indikator dari keluarga para sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III.

Melihat dari kondisi masyarakat yang ada di Kecamatan Sayung, indikator kesejahteraan yang digunakan peneliti sebagai alat ukur kesejahteraan di Kabupaten Demak adalah indikator kesejahteraan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) dikarenakan kriteria miskin yang digunakan BPS (Badan Pusat Statistik) lebih sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada pada daerah pedesaan sedangkan kriteria kemiskinan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) lebih tepat diterapkan di daerah perkotaan ([bkkbn.go.id](http://bkkbn.go.id)).

#### **D. Program Keluarga Harapan (PKH)**

##### **1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)**

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.

Pemerintahan era Presiden Bapak Joko Widodo mengeluarkan sebuah program PKH (Program Keluarga Harapan) Sebagai program

bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia (Kemsos.go.id).

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. (Jogloabang.com)

## **2. Tujuan, Sasaran dan Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)**

- a. Tujuan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:
  1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
  3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
  4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
  5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (Kemensos, 2019, 12).
- b. Sasaran Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:
- Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sasaran PKH Akses merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah:
1. Pesisir dan pulau-pulau kecil.
  2. Daerah tertinggal/terpencil dan atau
  3. Perbatasan antar negara (Kemensos,2019,12).
- c. Kriteria komponen penerima Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:
1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
    - a. Ibu hamil/menyusui; dan
    - b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
  2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
    - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat.
    - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
    - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
    - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
  3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat (kemensos,2019,13).

### **3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi:

1. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial.
  - a. Pembukaan rekening secara kolektif (Bulk Account Opening).
  - b. Cetak (perso) Kartu.
  - c. Produksi PIN Mailer.
  - d. Laporan hasil proses Bulk Account Opening.
2. Sosialisasi dan edukasi.
  - a. Sosialisasi Bansos Non Tunai PKH kepada Agen dan KPM oleh bank penyalur dan Kemensos (KPM baru).
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
  - a. Distribusi KKS, Buku Tabungan dan PIN Mailer dari KP ke KC
  - b. Distribusi KKS, Buku Tabungan dan PIN Mailer dari KC kepada KPM
  - c. Penandatanganan Aplikasi Pembukaan Rekening dan surat pernyataan persetujuan atau kuasa untuk memberikan informasi nomor rekening dan data pribadi.
  - d. Full aktivasi.
  - e. Laporan hasil penerimaan aplikasi pembukaan rekening
4. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH.
  - a. Pengecekan rekening dengan data yang akan diajukan bantuannya.
  - b. Pengajuan dana Ke KPPN.
  - c. Pembuatan Surat Perintah pemindahbukuan/Standing Instruction (SI) ke Bank Penyalur Pusat.
  - d. Pelaksanaan pemindahbukuan/Standing Instruction (SI).
  - e. Laporan hasil pemindahbukuan sebagaimana dimaksud poin no.2
5. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH.

- a. Dinas Sosial dan bank penyalur melakukan koordinasi persiapan penarikan dana bansos PKH.
  - b. Penarikan Dana oleh KPM.
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH.
- a. Rekonsiliasi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, ke tingkat pusat.
  - b. Rekonsiliasi dilakukan oleh Bank Penyalur bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Provinsi, dan tingkat pusat
7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan sosial.
- a. Laporan periodik setiap tahap penyaluran.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH.
  - c. Analisa kecenderungan penyaluran bansos dari dashboard.
  - d. Analisa kecenderungan pengaduan terkait penyaluran bansos berdasarkan laporan contact centre PKH. (Kemensos,2019,18).

#### **4. Informasi tentang Bantuan Program Keluarga Harapan.**

1. Penarikan Bantuan Program Keluarga Harapan.
  - a. Basic Saving Account
 

Dana Bantuan Sosial PKH disalurkan ke rekening KPM dalam bentuk tabungan yang penggunaannya dapat menggunakan Kartu Elektronik Kombo atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat ditarik secara tunai. Apabila dana bantuan sosial PKH tidak dicairkan oleh KPM di periode tersebut, maka nilai bantuan PKH tersebut tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Rekening Tabungan KPM PKH.
  - b. Biaya Penarikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
 

KPM tidak dikenakan biaya untuk 2 (dua) kali transaksi pada setiap tahap penyaluran PKH di Agen Bank penerbit KKS.
  - c. Lokasi Penarikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
 

KPM dapat menarik/mencairkan bantuan sosial PKH dengan menggunakan KKS melalui agen Bank, Elektronik Warung Gotong (e-Warong), ATM atau kantor cabang/unit Bank terdekat.
2. Peran e-warong dalam penyaluran PKH.

- a. Menjadi perpanjangan tangan dari bank penyalur dalam program bantuan sosial secara non tunai.
  - b. Mensosialisasikan penggunaan instrumen KKS kepada penerima bantuan PKH.
  - c. Sebagai media penghubung bagi penerima bantuan PKH dalam penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan kendala teknis penarikan bantuan PKH.
  - d. Mengedukasi penerima bantuan PKH tentang produk dan jasa keuangan.
3. Pendamping sosial Program Keluarga Harapan.
- a. Koordinator Kabupaten/Kota
    1. Tugas

Koordinator Kabupaten/Kota adalah Sumber Daya Manusia yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI yang bertugas membantu kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota dalam dalam mengoordinir sumber daya manusia PKH di tingkat kabupaten/kota.
    2. Peran

Adapun peran Koordinator Kabupaten/Kota khusus terkait penyaluran PKH adalah:

      - Mengkoordinasikan pengelolaan data/dokumen terkait dengan hasil validasi calon KPM PKH, hasil verifikasi komitmen komponen PKH, hasil pemutakhiran KPM PKH, realisasi penyaluran bantuan PKH, serta data/dokumen PKH lainnya di Kabupaten/Kota lokasi tugas.
      - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan PKH serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi realisasi penyaluran bantuan PKH pada seluruh kecamatan di Kabupaten/Kota lokasi tugas.
  - b. Pendamping Sosial PKH
    1. Tugas

Pendamping Sosial PKH merupakan petugas yang melaksanakan pendampingan bagi para keluarga penerima manfaat PKH di tingkat kecamatan. Pendampingan dilakukan untuk keseluruhan proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

## 2. Peran

Pendamping Sosial PKH berperan dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni:

- a. Pertemuan awal
- b. Validasi
- c. Pemutakhiran data
- d. Verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan
- e. Mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/Kota
- f. Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)
- g. Melaksanakan penanganan pengaduan
- h. Membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan.

## c. Asisten Pendamping Sosial

### 1. Tugas

Asisten Pendamping Sosial adalah Sumber Daya Manusia yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI untuk membantu pelaksanaan tugas Pendamping Sosial di tingkat kecamatan.

### 2. Peran

Peran Asisten Pendamping Sosial terkait dengan PKH adalah membantu tugas Pendamping Sosial (Kemensos,2019,42).

### **BAB III**

#### **LANSKAP KECAMATAN SAYUNG**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Terbentuk**

Sejarah sayung menurut cerita dari sesepuh konon ceritanya berawal dari runtuhnya kerajaan majapahit dan berdirinya kerajaan Demak yaitu dikisahkan, serombongan para ulama' mengadakan perjalanan ke arah wilayah barat yang dipimpin dua tokoh .yaitu nyai siti Sundari dan kyai Mustofa atau lebih terkenal dengan nama singgahlah mereka di suatu tempat, kedua beliau berkeinginan menetap di wilayah tersebut, kemudian terjadilah perselisihan pendapat dimana lahan yang menjadi tempat tinggal, kemudian dengan kesaktian masing-masing keduanya membuat perjanjian kesepakatan masalah tapal batas wilayah .

Kyai mustofa / Singodrono mengeklaim bahwa wilayah yang akan di tempati seluas yang mampu dia terbang / babat, kelak wiyah tersebut di sebut wilayah Babadan / Dusun Babadan. Sedangkan Nyai siti Sundari mengeklaim wilayahnya seluas dengan cara membakar ranting dan dedaunan, di mana tempat yang kejatuhan bertebarnya abu dari pembakaran tersebut adalah wilayahnya, Kedu pihak sepakat dengan isi perjanjian tersebut.

Dengan kesaktiannya kyai Singo drono membabat hutan yang akan di jadikan wilayahnya dengan mendapat yang cukup luas, begitu pula Nyai siti sundari dengan kesaktiannya membakar ranting dan dedaunan yang abunya mampu menyebar luas hingga melebihi luas terbang /babatan dari kyai Singo drono, bahkan tebaran abu pembakarannya hingga jatuh di wilayah terbang / babatan kyai Singo drono. Dengan kerendahan hati kyai singo drono mengakui kesaktian dan kehebatan Nyai siti sundari dan mengakui wilayah Babadan dibawah kwkuasan Nyai siti sundari. Hubungan sayung dengan

sejarah tersebut, bahwa Sayung dari kata sayang yang dalam bahasa jawa “*WELAS ASIH*” dengan arti walaupun kedua tokoh terjadi perselisihan, namun keduanya salih saling sayang menyayangi. Itulah sejarah tentang Kecamatan Sayung yang dikenal sampai saat ini.

Visi dan Misi

Visi

- Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis

Misi

- Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
- Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi local serta mengurangi tingkat pengangguran.
- Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa.
- Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan social sesuai standar.
- Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif.
- Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.
- Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan public.
- Mewujudkan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berikut gambar struktur organisasi di Kecamatan Sayung:

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Sayung**

Camat	Sururi, SH,MH
Sekcam	Gunadi, S.IP,MH
Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Siti Khasanah, S.Sos
Staf	Tro Oktiana
	Adi Hastomo, SH
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Nur Patonah
Staf	R.Alex Soelisdio S
	Mat Sayuri
Kasi Tata Pemerintahan	Dra. Puji Prasetyaningtyas, MM
Staf	Fahri Nur Muhammadi
Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Sutaat, SE
Staf	Susilo Hadi Santoso
Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Dwi Ristanto, SE
Staf	Edy Supriyo, S.Ip
Kasi Kesejahteraan Rakyat	Juniati

**a. Kondisi Geografi**

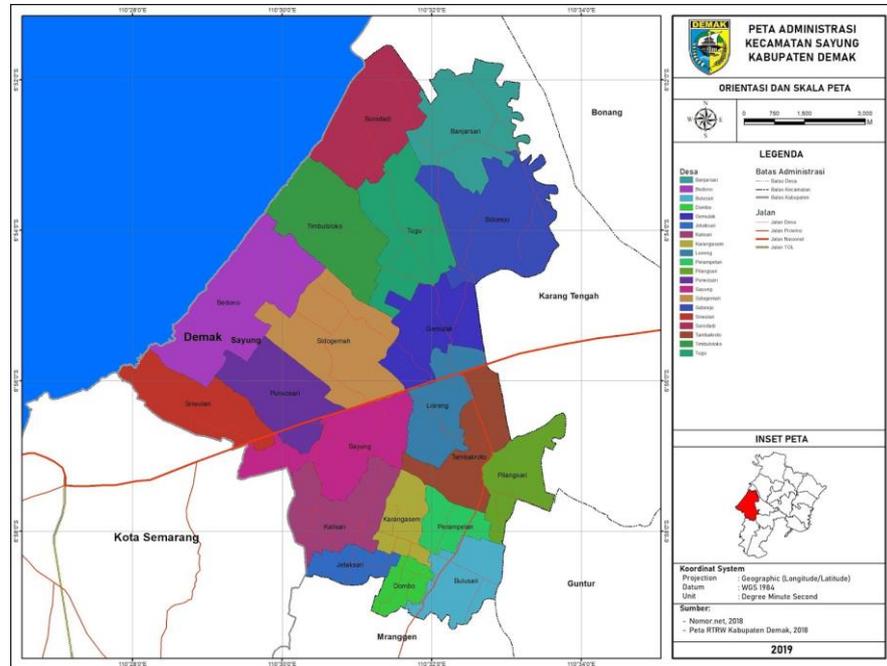
Kecamatan Sayung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Sayung berjarak sekitar 14 Km dari ibu kota Kabupaten Demak ke arah barat. Ibu kota kecamatan ini berada di Desa Sayung. Kecamatan Sayung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Secara geografis, Kecamatan Sayung terletak diantara 110° 27' 24" hingga

110° 33' 47" Bujur Timur dan 6° 51' 31" hingga 6° 59' 17" Lintang Selatan.

Secara administratif wilayah Kecamatan Sayung terdiri atas 20 desa, 101 Dusun serta 106 RW dan 500 RT. Seluruh desa di Kecamatan Sayung sudah termasuk klasifikasi swasembada. Jumlah perangkat yang telah terisi adalah Kepala Desa sejumlah 20 orang, sekretaris desa 17 orang, kepala dusun 77 orang, kepala urusan 78 orang dan pembantu kaur 68 orang. Tanah Bengkok di Kecamatan Sayung seluas 932,064 Ha atau sekitar 11,82 persen dari luas wilayah. Sementara itu, untuk tanah kas desa terdapat sekitar 4,03 persen dari total luas wilayah Kecamatan Sayung atau seluas 318,027 Ha.

Kecamatan Sayung merupakan satu dari 14 kecamatan di Kab. Demak yang berbatasan langsung dengan Sebelah utara: Laut Jawa, Sebelah timur: Kec. Karangtengah, Sebelah selatan: Kecamatan Mranggen, Sebelah barat: Kec. Genuk (Kota Semarang). Jumlah Desa dan luas wilayah terdiri dari 20 desa (10 desa di sebelah utara jalan Pantura dan 10 desa di sebelah selatan jalan Pantura), Berikut merupakan daftar desa yang ada di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Desa Banjarsari, Desa Bedono, Desa Bulusari, Desa Dombo, Desa Gemulak, Desa Jetaksari, Desa Kalisari, Desa Karangasem, Desa Loireng, Desa Perampelan, Desa Pilangsari, Desa Purwosari, Desa Sayung, Desa Sidogemah, Desa Sidorejo, Desa Sriwulan, Desa Surodadi, Desa Tambakroto, Desa Timbulsloko, Desa Tugu. Luas Wilayah: 78,80 km<sup>2</sup>.

**Gambar 2**  
**Peta Desa**



Sumber: *peta Kecamatan Sayung*

Kondisi topografi wilayah Kecamatan Sayung dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 15 meter diatas permukaan air laut (10 m/dpl). Wilayah Kecamatan Sayung merupakan daerah yang rata, tidak ada perbukitan sama sekali. Pusat pemerintahan Kecamatan Sayung terletak di Desa/Kelurahan Sayung dan untuk menuju Kantor Kecamatan Sayung dapat dijangkau dengan kendaraan umum karena terletak di pinggir Jalan Pantura dan bersebelahan dengan pasar sayung yang mudah dijangkau oleh siapapun.

Secara administratif luas wilayah Kecamatan Sayung adalah 78,80 km<sup>2</sup>, terdiri atas 20 desa. Sebagai daerah agraris yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian, wilayah Kecamatan Sayung terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 2.628.85 ha, dan selebihnya adalah lahan kering 5 251.15 ha. Menurut penggunaannya, seluruhnya lahan sawah yang digunakan berpengairan tadah hujan 2. 628.85 ha, pengairan tehnis. setengah tehnis,dan sederhana masing-masing 0 ha.

## b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Sayung berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk, Tahun 2018 adalah sebanyak 107.560 orang terdiri atas 53.893 laki-laki dan 53.667 perempuan. Jumlah penduduk ini naik sebanyak 1.188 orang atau sekitar 1,10 persen dari tahun sebelumnya. Secara berurutan, penduduk terbanyak terdapat di Desa Sriwulan dan Kalisari dengan jumlah penduduk masing-masing sebesar 12.482 orang dan 10.239 orang. Sedang penduduk terkecil terdapat di Desa Tambakroto 2.671 orang dan Desa Surodadi 2.914 orang.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk**

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Jetaksari	2500	2520	5020
2	Dombo	1797	1819	3616
3	Bulusari	2448	2431	4879
4	Prampelan	1988	1889	3877
5	Karangasem	2167	2121	4288
6	Kalisari	5139	5100	10239
7	Sayung	4986	4853	9839
8	Tambakroto	1386	1285	2671
9	Pilangsari	1541	1566	3107
10	Loireng	1694	1664	3358
11	Gemulak	2307	2202	4509
12	Sidogemah	3868	3737	7605
13	Purwosari	3261	4302	6663
14	Sriwulan	6205	6277	12482
15	Bedono	1748	1763	3511
16	Timbulsloko	1700	1744	3444
17	Tugu	2920	3052	5972

18	Sidorejo	2864	2845	5709
19	Banjarsari	1948	1909	3857
20	Surodadi	1426	1488	2914
21	Jumlah seluruh	53893	53667	107560

Sumber : *BPS Kab. Demak*

### c. **Tingkat Pendidikan Kecamatan Sayung**

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut John Dewey (2005,36) pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan, pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan ialah proses menyesuaikan pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang. Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadikan pertimbangan bagi masyarakat untuk menilai status sosial seseorang, dimana seorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan mendapatkan status sosial yang lebih baik di tengah kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Hal ini mendorong seseorang untuk mencapai tingkat pendidikan setinggi-tingginya, sehingga akan mendapatkan posisi sosial di masyarakat yang lebih baik.

Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan (guru) yang memadai. Pada tahun 2018 jumlah TK ada 23 buah, SD/MI di Kecamatan Sayung ada 46 buah, SLTP/MTs 19 buah dan SLTA/MA 13 buah. Sedang jumlah guru berturut-turut 63 orang guru untuk TK, 541

orang guru untuk SD/MI, 378 orang guru untuk SLTP/Mts dan 263 orang guru untuk SLTA/MA. Dari jumlah guru dan murid diatas dapat dihitung rasio murid terhadap guru, dimana rasio murid terhadap guru untuk SD/MI adalah 18,32 untuk SLTP/Mts 12,42 dan untuk SLTA/MA 10,14 Ini berarti bahwa setiap guru SD/MI harus menangani sedikitnya 18 murid, untuk SLTP/Mts 12 murid dan SLTA/MA 10 murid.

Tingkat pendidikan di Kecamatan Sayung Dari penduduk usia 10 tahun keatas menurut pendidikan yang ditamatkan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Sayung**

No	Tingkat pendidikan	jumlah
1	Tidak/ belum sekolah	11602
2	Belum taman SD	13841
3	Tidak tamat SD	8414
4	SD	16477
5	SLTP	16111
6	SLTA	14124
7	Akademi/PT	1880
8	Jumlah total	82449

Sumber: *BPS Kab.Demak tahun 2018*

Tabel di atas menunjukkan mengenai tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sayung. Melihat dari tabel di atas, sampai pada tahun 2018 ada beberapa orang yang di kategorikan masih dalam usia muda tidak pernah merasakan bangku sekolah. Dalam tabel ditunjukan usia 10 tahun keatas yang tidak pernah sekolah berjumlah 11602 orang. Sedangkan masyarakat yang sekolah dengan lulusan SD/ sederajat berjumlah 16477 orang. Jika melihat dengan jenjang yang lebih tinggi seperti lulusan D3, S1 dan S2 berjumlah 1880. Dari tabel dan data yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Sayung pendidikannya sudah maju dan sudah sadar akan pendidikan.

#### **d. Infrastruktur Kecamatan Sayung**

Pertama, sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

Di Kecamatan Sayung terdapat 23 Taman Kanak-kanak, 36 Sekolah Dasar, 8 SLTP, 5 SLTA, 10 Madrasah ibtdaiyah, 11 Madrasah Tsanawiyah, 8 Sekolah Aliyah Semua sarana pendidikan tersebar di 20 kelurahan yang ada di Kecamatan Sayung sehingga mudah dijangkau masyarakat.

Kedua, tempat peribadatan adalah tempat untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mayoritas masyarakat Kecamatan Sayung adalah beragama Islam, tetapi ada juga yang non muslim, Kecamatan Sayung memiliki 80 Masjid, 349 Mushola yang tersebar di 20 kelurahan, sehingga bias digunakan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Ketiga, jumlah pemeluk agama di Kecamatan sayung pada tahun 2018 yaitu 106393 beragama Islam, 506 beragama Katholik, 643 beragama Kristen, 18 beragama Hindu/Budha.

Keempat, sarana kesehatan yaitu tempat yang digunakan untuk upaya kesehatan. Sarana kesehatan sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. Sarana kesehatan di Kecamatan Sayung memiliki 2 Puskesmas, 5 Puskesmas pembantu, 20 Polindes, 9 Rumah bersalin.

#### **e. Ragam Pekerjaan di Kecamatan Sayung**

Mata Pencaharian/pekerjaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan pada setiap orang untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Masyarakat Kecamatan Sayung merupakan masyarakat yang majemuk, dimana masyarakatnya memiliki jenis pekerjaan yang beraneka ragam.

Wilayah Kecamatan Sayung mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan buruh industri karena letaknya dikelilingi sawah dan sebagian

wilayah sayung pantura tumbuh pesat berbagai pabrik. Petani desa selain menanam padi juga menanam jagung, ubi rambat, dan berbagai hasil tani yang lainnya

Selain itu, beberapa warga yang tidak memiliki sawah melakukan migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Migrasi ini biasanya dilakukan oleh pemuda atau pemudi Kecamatan sayung ada juga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) diluar negeri. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan jenis mata pencaharian di Kecamatan Sayung:

**Tabel 3**  
**Jenis Mata Pencaharian Kecamatan Sayung**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani sendiri	12289
2	Buruh tani	19829
3	Nelayan	1701
4	Pengusaha	272
5	Buruh industry	13567
6	Buruh bangunan	9961
7	Pedagang	7695
8	Angkutan	2238
9	Pegawai negeri/ABRI	1594
10	Pensiunan	620
11	Lainnya	3523
Total		39198

Sumber: *BPS Kab. Demak tahun 2018*

Dengan mata pencaharian yang berbeda-beda seperti pada tabel di atas masyarakat Kecamatan Sayung mayoritas bekerja sebagai petani sebanyak 12289 dan buruh tani sebanyak 19829.

## 2. Kondisi Ekonomi di Kecamatan Sayung

Kondisi ekonomi Kecamatan Sayung dipengaruhi oleh pertumbuhan hasil pertanian, dan sedikit dari industri kecil serta tidak memiliki pusat perdagangan. Pertanian merupakan sektor lapangan usaha andalan bagi mayoritas penduduk di Kecamatan Sayung.

Secara administratif luas wilayah Kecamatan Sayung adalah 78,80 km<sup>2</sup>, terdiri atas 20 desa. Sebagai daerah agraris yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian, wilayah Kecamatan Sayung terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 2.628.85 ha, dan selebihnya adalah lahan kering 5 251.15 ha. Menurut penggunaannya, seluruhnya lahan sawah yang digunakan berpengairan tadah hujan 2. 628.85 ha, pengairan teknis, setengah teknis, dan sederhana masing-masing 0 ha.

Untuk usaha peternakan, jenis unggas yang diusahakan adalah ayam kampung, ayam dan bebek/itik. Untuk ternak besar yang paling banyak diusahakan adalah kambing. Masyarakat di kelurahan morosari mayoritas peternak ayam potong karena ayam dapat membantu perekonomian mereka.

Dalam kondisi keuangan, pasar adalah sarana bertransaksi masyarakat dalam jual beli. Sebagian besar juga ada yang berjualan dipasar terdekat yaitu pasar Utama Sayung . Dipasar Sayung mereka melakukan aktivitas jual beli berupa sembako, barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari.

Dibawah ini adalah tabel jumlah luas panen dan produksi padi sawah di Kecamatan Sayung tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 4**

### **Jumlah Panen dan produksi hasil tani**

no	Jenis tanaman	Tambah tanam(Ha)	Luas panen(Ha)	Rata-rata(KwHa)	Produksi bersih(Ton)
1	Padi	3915	3752	70,84	26580

2	Jagung	805	584	65,74	3839
3	Ketela pohon	0	4	212,50	85
4	Ketela rambat	0	0	0,00	0
5	Kacang tanah	0	0	0,00	0
6	Kacang hijau	0	0	0,00	0
7	Kedelai	335	335	22,23	748
8	Sorgum	0	0	0,00	0

Sumber: *BPS Kab.Demak tahun 2018*

Dari data di atas, Pertanian adalah usaha masyarakat dengan jumlah paling banyak yaitu jenis padi. Pertanian menjadi usaha masyarakat karena di Kecamatan Sayung masih banyak sawah tanahnya yang belum terkena air laut, untuk sebagian Kecamatan Sayung utara tidak dapat lagi mengandalkan pertanian hanya mengandalkan tambak atau menjadi buruh industri yang sudah banyak pabrik berdiri di wilayah pantura Kecamatan Sayung.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN POLITIK DAN ANALISIS PROGRAM KELUARGA**  
**HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SAYUNG**

**A. Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung Tahun 2019**

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM (Rumah Tangga Miskin) mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial secara Non Tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang bedasarkan penetapan pemberi bantuan sosial.

Kebijakan yang diterapkan di Kecamatan Sayung yaitu seperti pemberian label masyarakat miskin dan tidak miskin, disini terjadi pro dan kontra antara sesama masyarakat jadi keputusan diambil dengan musdes (musyawarah desa) sehingga menghasilkan kebijakan tersendiri tiap kelurahan yang ada di Kecamatan Sayung, ada yang setuju dengan pemberian label supaya masyarakat yang mampu tetapi masih mendapat bantuan

program PKH malu dan mengundurkan diri, ada juga yang tidak menggunakan pemberian label tiap rumah dikhawatirkan menjadikan kesenjangan antara masyarakat disekitar penerima bantuan, meski kebijakan ini bertentangan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Mengenai kebijakan dan tujuan Peneliti menanyakan kepada Bapak Musafak selaku coordinator PKH Kabupaten Demak yaitu apa tujuan PKH di Kabupaten Demak?

“untuk kebijakan jelas semua sama, baik di kabupaten Demak di daerah-daerah lainpun juga sama kebijakan menganut pusat karena ini bantuan program nasional bukan daerah, mengenai tujuan yaitu antara lain, pertama tentu meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat, yang kedua mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, ketiga yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat” (Wawancara 10 Februari 2020).

Dalam menjalankan Program PKH di Kecamatan Sayung tentu program yang dijalankan sangat memiliki manfaat yang dirasakan kepada penerima bantuan program pertama yaitu meningkatkan taraf hidup penerima manfaat, meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan yang dulunya punya anak kesusahan dalam pembiayaan sekolah maka dengan adanya PKH mampu meringankan beban penerima keluarga manfaat tidak hanya pendidikan tetapi juga ada kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Yang kedua mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, keluarga miskin dan rentan yang ini tentu jelas mas mengurangi beban pengeluaran KPM, masa iya udah dapat bantuan masih belum merasa mengurangi beban pengeluaran.

ketiga yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat. dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, nah program PKH disini tidak hanya

membantu meringankan beban transfer duit terus duit digunakan seenaknya penerima, kami juga mengadakan yang namanya PK atau pertemuan Kelompok dimana setiap pertemuan memberikan materi berbeda-beda antara lain seperti Materi pengelolaan keuangan, gaya hidup sehat, awal usaha yang bisa dikelola daerah sekitar, jadi penerima manfaat tidak seterusnya bergantung pada bantuan pemerintah tetapi juga bertujuan mengentas masyarakat agar mampu mandiri.

Program PKH di Kecamatan Sayung tentu memiliki sasaran dan kriteria tertentu supaya masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah tepat sasaran menanyakan apa saja sasaran dan kriteria dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan.

bapak Musafak mengatakan:

“sasaran yang pasti saya sesuai yang sudah ditetapkan yaitu antara lain pesisir, daerah terpencil untuk kriteria ada banyak mas antara lain lansia, ibu hamil, balita dan anak yang mengenyam pendidikan”.

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DTPFM dan OTM) yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial berada di wilayah-wilayah Pesisir dan pulau pulau kecil Daerah tertinggal atau terpencil, Perbatasan antar negara

Berikut kriteria penerima PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi Ibu hamil/menyusui Anak berusia 0-6 tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi Anak sekolah dasar, Anak sekolah menengah pertama, Anak sekolah menengah atas, Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi Lanjut usia mulai dari 60 tahun, Penyandang disabilitas.

Mengenai mekanisme dalam penyaluran bantuan PKH Ada 6 urutan mekanisme yaitu Pembukaan rekening penerima bantuan sosial, sosialisasi dan edukasi, distribusi kartu keluarga Sejahtera (KKS), proses penyaluran bantuan sosial PKH, penarikan dana bantuan sosial PKH, rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.

Berikut penjabaran sasaran PKH (Program Keluarga Harapan). Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DTPFM dan OTM) yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial berada di wilayah-wilayah:

1. Pesisir dan pulau pulau kecil
2. Daerah tertinggal atau terpencil
3. Perbatasan antar negara

Berikut kriteria penerima PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai berikut:

4. Kriteria komponen kesehatan meliputi :
  - a. Ibu hamil/menyusui
  - b. Anak berusia 0-6 tahun
5. Kriteria komponen pendidikan meliputi :
  - a. Anak sekolah dasar
  - b. Anak sekolah menengah pertama
  - c. Anak sekolah menengah atas
  - d. Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
6. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :
  - a. Lanjut usia mulai dari 60 tahun
  - b. Penyandang disabilitas

Terkait dengan kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) di Kabupaten Demak khususnya peneliti focus ke Kecamatan Sayung,

menanyakan anggaran yang dikucurkan ke Kecamatan Sayung kepada bapak Musafak:

“ untuk anggaran sendiri di Kecamatan sayung mendapat jumlah kurang lebih 16 milyar yang dianggarkan untuk menjalankan Program Keluarga Harapan dengan tahapan 1,2,3,dan 4 nanti saya akan kasih file berapa anggaran yang dibagikan tiap kelurahan yang ada di Kecamatan Sayung”(Wawancara 10 Februari 2020)

Berikut penjabaran alokasi dana yang didapat di Kecamatan Sayung :

**Tabel 5**

**Tahap I**

Desa/Kelurahan	Jumlah KPM	Total Terima
Banjarsari	363	452.450.000
Bedono	215	276.550.000
Bulusari	142	171.325.000
Dombo	193	235.225.000
Gemulak	241	301.400.000
Jetaksari	224	278.235.000
Kalisari	330	406.550.000
Karangasem	158	187.325.000
Loireng	125	162.700.000
Perampelan	201	250.350.000
Pilangsari	145	180.000.000
Purwosari	257	339.725.000
Sayung	358	458.850.000
Sidogemah	343	432.875.000
Sidorejo	393	496.200.000
Sriwulan	146	178.050.000
Surodadi	164	209.075.000
Tambakroto	91	116.725.000
Timbulsloko	421	531.425.000

Tugu	441	538.775.000
Total	4.951	6.203.900.000

Pada tahap I, kecamatan sayung mendapatkan anggaran senilai 6.203.900.000 untuk menjalankan program PKH (Program Keluarga Harapan) dengan pembagian di berbagai kelurahan yang ada di kecamatan sayung, dengan kelurahan/desa yang mendapat pengeluaran anggaran yaitu kelurahan Tugu dengan pengeluaran krang lebih 538.775.000 dan penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat dengan jumlah 441 KPM).

**Tabel 6**

**Tahap II**

Desa/Kelurahan	Jumlah KPM	Total Terima
Banjarsari	362	252.450.000
Bedono	215	158.300.000
Bulusari	143	93.450.000
Dombo	191	129.775.000
Gemulak	243	173.775.000
Jetaksari	222	155.350.000
Kalisari	329	224.825.000
Karangasem	158	107.025.000
Loireng	125	93.950.000
Perampelan	201	140.625.000
Pilangsari	145	100.850.000
Purwosari	254	198.425.000
Sayung	351	259.725.000
Sidogemah	339	244.850.000
Sidorejo	388	274.525.000
Sriwulan	146	98.950.000
Surodadi	164	118.875.000
Tambakroto	91	67.275.000

Timbulsloko	418	301.175.000
Tugu	439	298.175.000
Total	4.924	3.492.350.000

Tahap kedua mengalami penurunan Keluarga Penerima Manfaat turun dari 4.951 menjadi 4.924 KPM begitu juga anggaran yang dikeluarkan turun menjadi 3.492.350.000 kenapa pengeluaran anggaran turun menjadi setengah anggaran dari tahap I bisa jadi ada KPM yang salah satu anggota keluarga yang lulus sekolah, ada yang meninggal dunia sehingga anggaran yang di keluarkan menjadi sedikit.

**Tabel 7**  
**Tahap III**

Desa/Kelurahan	Jumlah KPM	Total Terima
Banjarsari	362	261.150.000
Bedono	214	161.575.000
Bulusari	143	93.200.000
Dombo	188	133.275.000
Gemulak	240	180.100.000
Jetaksari	219	156.175.000
Kalisari	330	224.925.000
Karangasem	156	107.025.000
Loireng	121	93.025.000
Perampelan	196	137.600.000
Pilangsari	144	101.500.000
Purwosari	243	188.850.000
Sayung	352	266.025.000
Sidogemah	337	253.250.000
Sidorejo	388	277.725.000
Sriwulan	145	98.350.000
Surodadi	163	123.475.000

Tambakroto	91	67.875.000
Timbulsloko	414	310.000.000
Tugu	437	315.875.000
Total	4.883	3.551.675.000

Tahap ke-3 ini mengalami penurunan kembali meski tidak begitu signifikan penurunan penerima KPM di kecamatan Sayung dari tahap II sekitar 4.924 KPM menjadi 4.883 penerima KPM, tetapi pengeluaran anggaran PKH untuk kecamatan sayung naik menjadi 3.551.675.000 untuk Kecamatan Sayung.

**Tabel 8**  
**Tahap IV**

Desa/Kelurahan	Jumlah KPM	Total Terima
Banjarsari	393	210.800.000
Bedono	228	124.250.000
Bulusari	165	79.950.000
Dombo	215	112.350.000
Gemulak	259	143.675.000
Jetaksari	246	126.400.000
Kalisari	369	179.975.000
Karangasem	163	87.325.000
Loireng	140	79.175.000
Perampelan	207	106.175.000
Pilangsari	155	79.575.000
Purwosari	254	140.875.000
Sayung	362	195.675.000
Sidogemah	350	191.075.000
Sidorejo	432	229.725.000
Sriwulan	140	69.925.000
Surodadi	187	105.250.000

Tambakroto	104	61.050.000
Timbulsloko	423	230.850.000
Tugu	465	257.325.000
Total	5.257	2.881.400.000

Dari bantuan dana PKH tahap ke 4 total penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Kecamatan Sayung naik menjadi 5.257 KPM, sementara anggaran yang dikeluarkan untuk Program Keluarga Harapan tahap ke4 menurun menjadi 2.881.400.000, tiap tahap dari tahap 1-4 mengalami penurunan anggaran.

Table diatas menunjukkan dari tiap tahap pembagian selalu mengalami penurunan anggaran apa penyebab turunnya anggaran tetapi jumlah penerima pada tahap 4 mengalami pelonjakan keluarga penerima manfaat. Budi Wahyono selaku koordinator Kecamatan Sayung :

“tahap ke 4 mengapa mengalami pelonjakan KPM sedangkan anggaran yang didapatkan hanya sekitar 2.881.400.000 dari atasan, sedangkan KPM menjadi banyak itu karena target lansia pada tahap 4 itu melebihi target” (Wawancara 17 Februari 2020).

Dari penjelasan coordinator Kecamatan Sayung terdapat pelonjakan penerima bantuan PKH pada sektor lansia maka untuk tahun 2020 ini kebijakan lansia untuk umur diubah yang dulunya 60 tahun sudah bisa menerima bantuan, sekarang menjadi 70 tahun untuk bisa menerima bantuan PKH, untuk mensiasati penerima yang melonjak kami terpaksa mengurangi penerimaan bantuan agar semua kategori terpenuhi. Selanjutnya dalam pembagian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) selain dana bantuan tunai dalam setahun yang di bagi menjadi empat tahap pembagian atau dalam waktu 3 bulan sekali pembagian, juga ada pembagian sembako berupa beras dalam waktu 1 bulan sekali pembagian ke semua penerima keluarga penerima manfaat.

Mengenai bagaimana kebijakan yang diterapkan ketika penerima dirasa/dinilai sudah bukan menjadi kriteria tidak mampu dalam hal ini sudah

berkecukupan, mengingat banyak suara-suara dari kalangan masyarakat yang merasa PKH (Program Keluarga Harapan) tidak tepat sasaran, Bapak Musafak mengatakan :

“dalam menentukan suatu penerima itu layak menerima bantuan atau tidak ada alatnya sendiri di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memverifikasi, verifikasi dan validasi itu bisa mengetahui bahwa keluarga tersebut itu sangat miskin, miskin, hampir miskin, atau tidak miskin” (Wawancara 17 Februari 2020).

Menurut penjelasan dari koordinator Kabupaten Demak ada alat untuk menentukan mana yang layak mendapat bantuan dan mana yang tidak layak. Alat tersebut sudah ada di masing masing desa dan terintegrasi, untuk verifikasi, validasi dan verifikasi biasanya dilakukan Kementerian Sosial 2 kali dalam setahun untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan PKH dan siap yang sudah dinyatakan mampu, nah itulah yang menyebabkan banyaknya kerisauan dimasyarakat tentang salah sasaran Program Keluarga Harapan.

## **B. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung Tahun 2019**

Program sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. PKH adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Tetapi ada beberapa ketentuan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan uang tunai.

Maka dari itu program PKH ialah memberikan peluang yang lebih baik dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Berdasarkan surat Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 1293 tahun 2016 tentang Reorganisasi Pelaksanaan PKH Pusat dan Daerah,

PKH dialokasikan ke daerah-daerah yang telah memenuhi syarat yang ditentukan. Salah satunya di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Setelah menerima bantuan tunai dari PKH Kecamatan Sayung, aspek kesehatan, ekonomi serta pendidikan diharapkan mengalami perubahan, dan tentunya akan berangsur-angsur membaik.

Menurut penjelasan dari Koordinator PKH (Program Keluarga Harapan) Kecamatan Sayung, bahwa seluruh Kelurahan/Desa di Kecamatan Sayung telah menerima bantuan PKH terhitung sejak tahun 2012. Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa implementasi penetapan peserta penerima PKH di Kecamatan Sayung tidak sesuai dengan kriteria penetapan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) penerima bantuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam implementasi pelaksanaan PKH masih ditemukan peserta PKH yang dikategorikan sebagai keluarga sejahtera namun tercantum sebagai peserta PKH yang mendapat bantuan tunjangan yang sebenarnya ditujukan untuk keluarga miskin/tidak mampu. Tentu hal ini merupakan kesalahan yang mengakibatkan kesenjangan dan tidak meratanya distribusi dari program PKH ini. PKH di Kecamatan Sayung masih belum bisa dikatakan efektif karena masih banyaknya masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan tetapi belum mendapat bantuan.

Budi Wahyono mengatakan :

“Kita selaku PPKH (Pelaksana Program Keluarga Harapan) Kecamatan Sayung sudah menjalankan kebijakan yang telah ditentukan dari pusatnya” (Wawancara 17 Februari 2020).

Mengenai masalah banyaknya suara dari masyarakat. Mengenai masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan PKH itu sudah mendapatkan teguran dari petugas yang ada dilapangan mengingatkan bahwa PKH ini sasarannya untuk Keluarga yang kurang mampu, petugas pelaksana PKH tidak bisa memutus begitu saja kepada masyarakat yang salah sasaran karena kebijakan itu semua dari pusat, bantuan dapat berhenti ketika dari pusat sudah menentukan atau yang bersangkutan mengundurkan

diri dan petugas PPKH hanya bisa menyampaikan dan melaksanakan program bantuan.

Mengenai penjelasan dari coordinator diatas memang mengakui bahwa implementasi PKH di Kecamatan sayung memang masih memiliki kendala terkait kurang meratanya dalam hal penerimaan bantuan program keluarga tersebut sehingga banyak menimbulkan keresahan di berbagai kalangan masyarakat, hal ini harus segera dicari jalan keluar oleh Kementerian Sosial dan pihak-pihak terkait agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Apa yang menyebabkan di Kecamatan Sayung berbeda-beda dalam hal menandai rumah Penerima Keluarga Manfaat sehingga bisa mengetahui ini mendapat PKH atau tidak

“ Sebenarnya dari pemerintah pusat itu malah melarang mas dengan pemberian label dirumahnya bahwa ini mendapat bantuan PKH atau tidak takutnya nanti timbul kesenjangan yang semakin jauh” (wawancara 17 februari 2020).

Dari pemaparan diatas memang tiap daerah itu memiliki kebijakan sendiri tentang mengenai pemberian label bantuan dari pemerintah, ada yang menyetujui dan ada yang tidak. Pemberian label penerima PKH itu inisiatif dari musdes (musyawarah desa) terkait pemberian label tersebut, semisal di desa Sidogemah mengapa tidak ada pemberian label takutnya ada kerusuhan antar tetangga mas, beda lagi di Desa lain memang ada persetujuan pemberian label agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Memang memiliki pro dan kontra jika memberikan label jika masyarakat penerima bantuan PKH mampu maka akan meempermalukan diri sendiri, tetapi dilain tempat juga akan semakin mengucilkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah.

kendala apa yang dirasakan saat implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sayung oleh rekan-rekan PPKH itu apa saja selain tadi diatas sebutkan bahwa kurang tepatnya pemberian bantuan PKH di Kecamatan Sayung.

Budi Wahyono mengatakan:

“selain kendala diatas yang saya jelaskan tadi yaitu ada juga kendala tentang PK (Pertemuan Kelompok) nah disini biasanya para pendamping dari kami kesulitan dalam menjalankan tugas PKH” (wawancara 17 februari 2020).

Dalam pertemuan kelompok itu membahas tentang, ekonomi, pendidikan, kesehatan info perkembangan perubahan-perubahan kebijakan tentang PKH dll,kesulitan disini yaitu ketika mengadakan PK yang hadir itu hanya sedikit sehingga info yang diberikan tidak semuanya tersampaikan kepada masyarakat penerima bantuan. Biasanya pertemuan kelompok itu tiap bulan minggu pertama.

Kesulitan yang paling dirasa yaitu bagaimana mengubah mindset masyarakat agar tidak bergantung dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga bisa lebih mandiri nah dalam PK itu kan ada materi tentang ekonomi bagaimana cara membeli kebutuhan dengan keinginan, bagaimana cara mengelola keuangan agar seefisien mungkin, nah biasanya kan masyarakat itu kalo dapat ya dihabiskan lalu menunggu bantuan yang akan datang lagi. Sesuai dengan tujuan PKH yaitu memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

Dari penjelasan bahwa PKH memutus mata rantai kemiskinan tentu juga berhubungan dengan mengubah perilaku masyarakat agar masyarakat menghilangkan kebiasaan buruk yang berdampak pada kemiskinan yaitu dengan diadakannya Pertemuan Kelompok agar masyarakat yang kurang mampu dapat juga belajar sehingga bisa meninggalkan kebiasaan yang salah dan bisa berfikir lebih maju lagi.

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan berdasarkan komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dilakukan melalui sistem rekening oleh lembaga bayar/bank penyalur. Bantuan bagi peserta Program Keluarga Harapan ini

terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen pendidikan dan kesehatan yang diberikan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria Program Keluarga Harapan. Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut.

Tujuan dari pelaksanaan PKH yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan. Terus bagaimana cara penyaluran dana bantuan dari awal ditetapkan mendapatkan bantuan PKH tersebut.

Budi Wahyono selaku coordinator PKH Kecamatan Sayung menjelaskan Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat adalah kegiatan utama PKH yang terdiri dari 7 (tujuh) tahap kegiatan berkelanjutan yang saling terkait satu sama lain ketujuh tahap tersebut dapat dilihat pada mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) secara non tunai meliputi:

1. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial.
2. Sosialisasi dan edukasi.
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
4. Proses penyaluran bantuan sosial PKH.
5. Penarikan dana bantuan sosial PKH.
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.

Berikut merupakan penjelasan mekanisme setiap proses dalam penyaluran dana bantuan sosial secara non tunai PKH :

1. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial ada 4 tahap yaitu:
  - a. Pembukaan rekening secara kolektif (Bulk Account Opening).
    - Penanggung jawab/pelaksana: kementerian Sosial RI dan Bank Penyalur.

- b. Melakukan pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera sesuai data pembukaan rekening penerima bantuan sosial.
    - Penanggung jawab/pelaksana: kementerian Sosial RI dan Bank Penyalur.
  - c. Melakukan pembuatan dan pengiriman (Personal Identification Number) PIN Mailer.
    - Penanggung jawab/pelaksana: kementerian Sosial RI dan Bank Penyalur.
  - d. Laporan hasil proses burekol (buka rekening kolektif).
    - Penanggung jawab/pelaksana: kementerian Sosial RI dan Bank Penyalur.
2. Sosialisasi dan Edukasi Penyaluran PKH
- a. Menyelenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Bantuan Sosial Non Tunai.
    - Penanggung jawab/pelaksana: kementerian Sosial RI dan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Penyalur, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
3. Distribusi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat)
- a. Mempersiapkan distribusi KKS, buku tabungan, PIN mailer oleh Bank Penyalur.
    - Penanggung jawab/pelaksana: Dinas Sosial Kabupaten/kota, Bank Penyalur, Pendamping sosial PKH.
  - b. Melakukan distribusi KKS, buku tabungan dan PIN mailer kepada penerima bantuan sosial.
    - Penanggung jawab/pelaksana: Dinas Sosial Kabupaten/kota, Bank Penyalur, Pendamping sosial PKH.
  - c. Laporan Pelaksanaan Distribusi KKS, PIN Mailer, dan Buku Tabungan.

- Penanggung jawab/pelaksana: Bank Penyalur
4. Proses penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
    - a. Pengecekan rekening dengan data yang akan diajukan bantuannya.
      - Penanggung jawab/pelaksana: Kemensos RI (Direktorat JSK-Subdit Kepesertaan dan Subdit Bansos)
    - b. Pengajuan dana ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
      - Penanggung jawab/pelaksana: Kemensos RI (Direktorat JSK- Subdit Bansos) dan KPPN
    - c. Pembuatan Surat Perintah pemindahbukuan/Standing Instruction (SI) ke Bank Penyalur Pusat.
      - Penanggung jawab/pelaksana: Kemensos RI (Direktorat JSK- Subdit Bansos)
    - d. Pelaksanaan pemindahbukuan/Standing Instruction (SI).
      - Penanggung jawab/pelaksana: Bank Penyalur
    - e. Laporan hasil pemindahbukuan.
      - Penanggung jawab/pelaksana: Bank Penyalur
  5. Penarikan dana bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan).
    - a. Dinas Sosial dan bank penyalur melakukan koordinasi persiapan penyaluran bansos PKH.
      - Penanggung jawab/pelaksana: Kemensos RI (Direktorat JSK- Subdit Bansos), Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Koordinator Kabupaten/Kota, Bank Penyalur.
    - b. Penarikan dana bantuan sosial Non Tunai.
      - Penanggung jawab/pelaksana: Bank Penyalur, Pendamping Sosial PKH, Koordinator Kabupaten/Kota.
    - c. Penarikan dana bantuan sosial komunitas.

6. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan).
  - a. Rekonsiliasi Inisiasi (KPM Baru).
    1. Melakukan rekonsiliasi tingkat kabupaten/kota.
      - Penanggung jawab/pelaksana: Bank Penyalur, Dinas Sosial, Pendamping Sosial PKH, Koordinator Kabupaten/Kota.
    2. Melakukan rekonsiliasi tingkat provinsi.
      - Penanggung jawab/pelaksana: Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi, Bank Penyalur.
    3. Melakukan rekonsiliasi tingkat pusat.
      - Penanggung jawab/pelaksana: Kemensos RI (Direktorat JSK-Subdit Bansos), Bank Penyalur,
  - b. Rekonsiliasi Lanjutan (KPM Lama).
    1. Melakukan rekonsiliasi tingkat pusat.
      - Penanggung jawab/pelaksana: Kemensos RI (Direktorat JSK-Subdit Bansos), Bank Penyalur,
    2. Melakukan rekonsiliasi tingkat provinsi.
      - Penanggung jawab/pelaksana: Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi, Bank Penyalur.
    3. Melakukan rekonsiliasi tingkat kabupaten/kota.
      - Penanggung jawab/pelaksana: Bank Penyalur, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial PKH, Koordinator Kabupaten/Kota.
  - c. Rekonsiliasi dana PKH.
    1. Rekonsiliasi antara pencatatan dana PKH di Subdit Bansos dan Rekening Koran di masing-masing bank penyalur.
      - Penanggung jawab/pelaksana: Subdit Bansos dan Bank Penyalur.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.

- a. Menyampaikan laporan progres penyaluran PKH secara periodik Kepada Kementerian Sosial (per tahapan penyaluran).
  - Penanggung jawab/pelaksana: Bank Penyalur.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH.
  - Penanggung jawab/pelaksana: Kemensos RI (Direktorat JSK Subdit Bansos-Subdit kepesertaan), Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Bank Penyalur, Pendamping Sosial PKH.

Itulah langkah-langkah penyaluran dana bantuan yang sudah dijelaskan diatas dari awal ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.

### **C. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung pada Tahun 2019**

Setelah penyaluran dana bantuan pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan. Setiap 15-25 keluarga penerima manfaat, disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH Kecamatan untuk setiap kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan keluarga dan lain sebagainya. Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjaring kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta, tetapi dapat mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan lain sebagainya yang dilaksanakan. Menurut penuturan Ibu Ani selaku pendamping di Desa Sodong, kelurahan Sidogemah

“bahwa untuk mempermudah pendampingan kepada penerima manfaat kami buat kelompok-kelompok yang rumahnya saling berdekatan agar mempermudah dan mempercepat ketika ada

kumpul-kumpul, dalam satu kelompok ada pembentukan struktur kepengurusan, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara” (Wawancara 20 februari 2020).

Satu kelompok terdiri dari sepuluh sampai lima belas orang penerima manfaat. Pemilihan ketua kelompok dipilih dengan cara terbuka dan sukarelawan. Pertemuan kelompok diadakan tiap awal bulan antara minggu pertama dan kedua, tiap pertemuan itu membahas materi berbeda-beda tergantung dari tim pendamping PKH ingin memberikan materi apa yang dibutuhkan penerima manfaat. Kendala dalam melakukan pertemuan kelompok, ketika melakukan pertemuan kelompok itu tidak mesti semuanya, tidak semua lansia ada ibu-ibu dari keluarga yang kurang mampu mereka juga bekerja, jadi tidak bisa mengikuti pertemuan kelompok.

Dampak dari adanya bantuan dari pemerintah yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) yang dirasakan masyarakat kurang mampu dan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan PKH di Kecamatan Sayung adalah meringankan beban keluarga khususnya pendidikan dan kesehatan yang dulunya ketika awal kenaikan kelas harus susah payah dalam membayar berbagai kebutuhan, sekarang mereka tidak lagi harus berfikir keras untuk berusaha membayar kebutuhan sekolah, begitupun dengan kesehatan.

Tetapi dampak dari PKH dikhawatirkan juga berdampak negatif kepada masyarakat penerima bantuan itu sendiri, tiap pemikiran orang berbeda-beda ada yang mendapat bantuan digunakan semaksimal mungkin agar bantuan yang didapat benar-benar berguna untuk keluarganya supaya bisa meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik, tetapi ada juga yang malah mengandalkan bantuan sepenuhnya untuk bertahan hidup, menggunakan dana bantuan dengan tidak tepat sasaran, sehingga dalam berkehidupan masih jalan ditempat tanpa merasakan dampak yang sebenarnya dalam program bantuan dari pemerintah.

Berikut dampak yang dirasakan adanya bantuan PKH berdasarkan wawancara dengan penerima bantuan PKH ibu Sofiatun selaku narasumber:

“manfaat yang saya rasakan saat ini sangat banyak mas ketika saya mendapat bantuan PKH pada tahun 2015 saya sering mengikuti pertemuan-pertemuan kelompok yang dilakukan oleh pendamping PKH dari kecamatan sayung” (Wawancara 20 Februari 2020).

Manfaat yang dirasakan dari penerima bantuan PKH pertama tentunya biaya sekolah anak sekarang sudah ringan, karena sudah mendapatkan bantuan PKH pendidikan anak, bisa untuk melakukan pembayar SPP, Seragam, LKS dan yang lainnya yang berhubungan dengan sekolah, manfaat lain yang didapat yaitu pembelajaran yang disampaikan pendamping PKH tentang bagaimana mengatur keuangan, terus bagaimana cara hidup sehat yah macam-macam yang kita pelajari.

Untuk alur pembayaran yaitu yang pertama petugas BPS mendata warga dengan menggunakan koesioner, ada banyak isian, missal punya motor berapa, pendapatan perbulan berapa, kondisi rumah seperti apa dll, Yang kedua diolah oleh petugas BPS dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan diteruskan ke tingkat pusat, jadilah data dengan nama DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), kemudian Kemensos mengambil data dari DTKS itu untuk menjadi patokan penerima PKH, dan PKH itu termasuk cluster yang paling bawah (Sangat miskin). Calon KPM yang divalidasi / yang lolos berarti menjadi sah penerima PKH.

Selanjutnya wawancara dengan ibu samrotun penerima bantuan PKH di desa Sodong Kelurahan Sidogemah:

“manfaat yang saya rasakan ya itu mas misal seragam sekolah anak saya rusak, dulu saya harus ngumpulin uang dulu buat membelikan seragam yang baru, setelah saya mendapat bantuan PKH kategori anak sd ya uang itu buat kebutuhan hanya untuk anak saya mas, jadi ketika seragam rusak gak harus pusing ngumpulin uang buat membeli seragam jadi langsung saya pakai bantuan yang didapat. Bantuan berapapun tetap saya bersyukur mas daripada ga dapat sama sekali” (Wawancara 20 Februari 2020).

Manfaat yang dirasakan juga sama disini dengan penerima PKH yang lain saya fokuskan untuk pendidikan anak agar mendapat ilmu

mendapat kerja yang layak supaya besok menjadi orang sukses dan tidak mengikuti jejak orang tuanya, ancaman rob juga selalu bikin nambah beban pikiran. Mau tidak mau keluargaku juga harus berusaha manage pengeluaran keuangan seminim mungkin, jadi manfaat yang dirasakan selama mendapat bantuan PKH dan sering mengikuti pertemuan kelompok yang diadakan setiap awal bulan juga membantu dalam berkehidupan.

Dalam melakukan wawancara dengan Koordinator Kecamatan Sayung, dengan adanya bantuan dari pemerintah jika sudah dihentikan apa yang akan terjadi, apakah masyarakat akan tetap berada ditahap kemiskinan atau bisa lepas dari belenggu kemiskinan, dari jawaban coordinator Kecamatan Sayung sangat yakin bahwa bantuan PKH ini sudah memiliki tujuan yaitu meningkatkan kualitas masyarakat yang kurang mampu, tentu jika bantuan dihentikan berarti program tersebut sudah berjalan dengan baik dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Tidak lupa juga peneliti mewawancarai dengan penerima bantuan PKH, jawaban mereka juga sangat meyakinkan, jika bantuan dihentikan mereka sudah siap dan sudah mengerti cara menjalankan program keuangan karena sudah dibekali pengetahuan oleh tim PPKH Kecamatan Sayung sehingga mereka tidak khawatir jika bantuan dihentikan, mereka juga menyadari bahwa tidak selamanya harus mengandalkan bantuan dari pemerintah bantuan itu hanya untuk meringankan beban dan bisa menjadikan kebangkitan dari keterburukan dalam berkehidupan.

Dari wawancara dengan narasumber diatas menurut penulis bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) sangat membantu keluarga kurang mampu terutama dalam hal pendidikan bantuan PKH sangat dirasa membantu biaya pengeluaran pendidikan untuk anak-anak mereka, program yang diisi oleh pendamping dengan berbagai materi tentang berkehidupan seperti bagaimana cara mengatur keuangan, cara hidup sehat, dan masih banyak lainnya juga sangat membantu keluarga kurang mampu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan data penelitian yang telah dikumpulkan dan dibahas pada penelitian ini mengenai Politik Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak (Studi Analisa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung tahun 2019) yaitu:

1. Terkait dengan Kebijakan Program Keluarga Harapan yang ada di Demak, UPPKH demak hanya bisa menjalankan kebijakan langsung dari pusat, Dinas Sosial Kabupaten Demak hanya mendukung kebijakan yang langsung turun dari pusat/Kementerian Sosial. Dan kebijakan bersyarat ini hanya ditujukan kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.
2. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sayung juga berjalan sesuai arahan yang sudah ditetapkan tetapi bagaimanapun juga tetap masih ada kendala dalam penerapan PKH, seperti bagaimana cara menjadikan masyarakat penerima bantuan PKH bisa mengelola keuangannya menjadi lebih efisien tanpa menjadi konsumen yang berlebihan sehingga tujuan dalam pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif dan sesuai target.
3. Dampak yang dirasakan keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sayung antara lain yaitu dapat membantu meringankan beban biaya sekolah, dapat membantu meringankan beban pengeluaran biaya dalam berkehidupan. Meski ada dampak lain yang dikhawatirkan yaitu ketergantungan penerima manfaat atas bantuan yang diberikan dari pemerintah.

## **B. Saran**

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan hal-hal yang sekiranya perlu diperbaiki dalam mekanisme kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sayung yaitu:

1. Perlunya adanya pendataan ulang terkait penerima bantuan PKH, jika dalam penentuan penerima bantuan 2 kali dalam setahun maka juga harus dilakukan pengecekan langsung ke rumah penerima manfaat PKH, agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan.
2. Perlunya sosialisasi ke desa-desa terkait Program Keluarga Harapan bahwa bantuan ini dikhususkan untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
3. Masyarakat yang merasa kehidupan ekonominya sudah tercukupi harus punya kesadaran bahwa dirinya tidak perlu menerima bantuan PKH dari pemerintah.
4. Perlunya ketegasan peran pendamping PPKH untuk lebih tegas mengingatkan tentang kesadaran kepada penerima bantuan yang sudah bisa mandiri dalam kehidupan untuk tidak menerima bantuan serta berani mengusulkan pemutusan bantuan, karena masih banyak pendamping yang hanya bertugas menyampaikan materi saja.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fahrudin, Adi (Ed). 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Indrajit, Wisnu dan Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat Untuk Memutus Rantai Kemiskinan)*. Malang: Intrans Publishing.
- Nugroho riant, 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho riant, 2014. *Public policy (Edisi Kelima)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- P. Todaro, Michael dan C. Smith, Sthepan, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelpan*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Sugiono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti Ramlan, 2010. *memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Winarno Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

## **Skripsi dan Jurnal**

Chriswardini Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*,  
*Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 08, No.03, 2005.

Ismoyo, Didin. 2017. *Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pemerintah Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kumala, Agustin, Rais, “Dinamika Kemiskinan dan Pengukuran Kerentanan Kemiskinan, Dalam Upaya Melindungi Anak-Anak dari Dampak Kemiskinan(Studi Kasus pada Rumah Tangga di Pulau Jawa Tahun 2008-2010)

Kurniawan, Alex. 2011. *Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Mahendra, Frengky Argiawan. 2017. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul*. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga.

Nurwati Nunung, “*Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan* “ dalam jurnal kependudukan Padjajaran vol.10, No.1, 2008.

Supriadi. 2017. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilan Di Kota Palopo*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Tibyan. 2010. *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## **Undang-Undang dan web**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-  
UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga  
Harapan.

Petunjuk teknis, Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan  
Sosial Nomor: 04/LJS/082018

BPS, Kecamatan Sayung Dalam Angka 2019

[https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4138150/ini-data-  
kemiskinan-ri-5-tahun-terakhir-menurut-bps](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4138150/ini-data-kemiskinan-ri-5-tahun-terakhir-menurut-bps) diakses pada tanggal  
27 september 2019 pukul 13:58

<https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1> diakses pada tanggal 27  
september 2019 pukul 14:18

[https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-  
penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html)  
diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 21.12

[https://demakkab.bps.go.id/dynamictable/2019/11/26/108/banyaknya-  
penduduk-miskin-di-kabupaten-demak-tahun-2015---2019.html](https://demakkab.bps.go.id/dynamictable/2019/11/26/108/banyaknya-penduduk-miskin-di-kabupaten-demak-tahun-2015---2019.html)  
diakses pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 21.45

[https://agus-mal.blogspot.com/2018/03/ayat-al-quran-tentang-kemiskinan-  
dan.html](https://agus-mal.blogspot.com/2018/03/ayat-al-quran-tentang-kemiskinan-dan.html) diakses pada tanggal 25 januari 2020 pukul 20.16

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39979/Chapter%20  
II.pdf;sequence=4](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39979/Chapter%20II.pdf;sequence=4) diakses pada tanggal 1 mei 2020 pukul 19.57

<http://e-journal.uajy.ac.id/1756/3/2EP15294.pdf> diakses pada tanggal 2  
mei 2020 pukul 08.18

<http://bkkbn.go.id/datadaninformasi/materi/>, diakses pada 2 Mei 2020

Pukul 22:30 WIB

Wawancara Bapak Musafak

Wawancara Bapak Budi

Wawancara Ibu Ani

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian dengan Narasumber I

### Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian

**Narasumber : Bapak Musafak (Koordinator PKH Kabupaten Demak)**

**Tanggal : 10 Februari 2020**

1. Bagaimana kebijakan Program Keluarga Harapan yang ada di kecamatan sayung?

“ jadi begini mas,kebijakan PKH itu semua keputusan ada di paling atas,dalam hal ini pemerintah pusat/kementrian sosial kami selaku coordinator daerah hanya bisa mendukung berjalannya program PKH itu sendiri,seperti penyediaan tempat, koordinasi tiap daerah seperti itu mas”

2. Apa tujuan PKH di Kabupaten Demak ?

“ untuk jelas semua sama ya mas baik di kabupaten Demak di daerah-daerah lainpun juga sama yaitu antara lain nih mas pertama tentu meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan yang dulunya punya anak kesusahan dalam pembiayaan sekolah maka dengan adanya PKH mampu meringankan beban penerima keluarga manfaat tidak hanya pendidikan tetapi juga ada kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Yang kedua mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan yang ini tentu jelas mas mengurangi beban pengeluaran KPM, masa iya udah dapat bantuan masih belum merasa mengurangi beban pengeluaran.

Ketiga yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, nah program PKH disini tidak hanya membantu meringankan beban transfer duit terus duit digunakan seenaknya penerima, kami juga mengadakan yang namanya PK atau pertemuan Kelompok dimana setiap pertemuan memberikan materi berbeda-beda

antara lain seperti Materi pengelolaan keuangan, gaya hidup sehat, awal usaha yang bisa dikelola daerah sekitar, jadi penerima manfaat tidak seterusnya bergantung pada bantuan pemerintah tetapi juga bertujuan mengentas masyarakat agar mampu mandiri.

3. apa saja sasaran dan kriteria dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan?

“Kalau sasaran yang pasti saya sesuai yang sudah ditetapkan yaitu antara lain pesisir, daerah terpencil untuk kriteria ada banyak mas antara lain lansia, ibu hamil, balita dan anak yang mengenyam pendidikan. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DTPFM dan OTM) yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial berada di wilayah-wilayah Pesisir dan pulau pulau kecil Daerah tertinggal atau terpencil, Perbatasan antar negara

Berikut kriteria penerima PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai berikut:

7. Kriteria komponen kesehatan meliputi Ibu hamil/menyusui Anak berusia 0-6 tahun.
  8. Kriteria komponen pendidikan meliputi Anak sekolah dasar, Anak sekolah menengah pertama, Anak sekolah menengah atas, Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
  9. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi Lanjut usia mulai dari 60 tahun, Penyandang disabilitas
4. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Demak?

“Ada 6 urutan mekanisme setau saya mas yaitu Pembukaan rekening penerima bantuan sosial, sosialisasi dan edukasi, distribusi kartu keluarga Sejahtera (KKS), proses penyaluran bantuan sosial PKH, penarikan dana bantuan sosial PKH, rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.

5. Berapa anggaran yang dikucurkan ke Kecamatan Sayung ?

“ untuk anggaran sendiri di Kecamatan sayung mendapat jumlah kurang lebih 16 milyar yang dianggarkan untuk menjalankan Program Keluarga Harapan dengan tahapan 1,2,3,dan 4 nanti saya akan kasih file berapa anggaran yang dibagikan tiap kelurahan yang ada di Kecamatan Sayung”

6. Bagaimana kebijakan yang diterapkan ketika penerima dirasa/dinilai sudah bukan menjadi kriteria tidak mampu dalam hal ini sudah berkecukupan, mengingat banyak suara-suara dari kalangan masyarakat yang merasa PKH (Program Keluarga Harapan) tidak tepat sasaran?

“ sebenarnya dalam menentukan suatu penerima itu layak menerima bantuan atau tidak ada alatnya sendiri di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosisal) untuk memverifikasi, verivali dan validasi itu bisa mengetahui bahwa keluarga tersebut itu sangat miskin, miskin, hampir miskin, atau tidak miskin. Alat tersebut sudah ada di masing masing desa dan terintegrasi, untuk verivikasi, validasi dan verivali biasanya dilakukan Kementrian Sosial 2kali dalam setahun untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan PKH dan siap yang sudah dinyatakan mampu, nah itulah yang menyebabkan banyaknya kerisauan dimasyarakat tentang salah sasaran Program Keluarga Harapan”

Lampiran 2. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian dengan Narasumber II

**Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian**

**Narasumber : Bapak. Budi Wahyono (koordinator Kecamatan Sayung)**

**Tanggal : 17 Februari 2020**

1. Sejak kapan Bapak menjadi anggota PPKH di Kecamatan Sayung?

“Saya awal masuk menjadi anggota PPKH di Kecamatan Sayung sejak tahun 2014 mas, nah awal ada PKH di kecamatan sayung itu kan tahun 2012”.

2. Ada berapa pak jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Sayung?

“jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Sayung yaitu 20 kelurahan mas yaitu Kelurahan Banjarsari, Bedono, Bulusari, Dombo, Gemulak, Jetaksari, Kalisari, Karangasem, Loireng, Prampelan, Pilangsari, Purwosari, Sayung, Sidogemah, Sidorejo, Sriwulan, Surodadi, Tambakroto, Timbulloko, Tugu”.

3. Mengingat masyarakat di Kecamatan Sayung masih ada yang mendapatkan bantuan PKH dari Pemerintah itu menandakan kurang efektifnya Bantuan PKH di Kecamatan Sayung, bagaimana tanggapan bapak tentang ini?

“PKH di Kecamatan Sayung masih belum bisa dikatakan efektif karena masih banyaknya masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan tetapi belum mendapat bantuan, “ Kita selaku PPKH (Pelaksana Program Keluarga Harapan) Kecamatan Sayung sudah menjalankan kebijakan yang telah ditentukan dari pusatnya mas, mengenai masalah banyaknya suara dari masyarakat. Mengenai masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan PKH itu sudah kami ingatkan bahwa PKH ini sasarannya untuk Keluarga yang kurang mampu, kamipun tidak bisa memutus begitu saja kepada masyarakat yang salah sasaran karena kebijakan itu semua dari pusat, bantuan dapat berhenti ketika dari pusat sudah menentukan atau yang bersangkutan mengundurkan diri dan kami hanya bisa menyampaikan dan melaksanakan PKH mas”

4. Apa yang menyebabkan di Kecamatan Sayung berbeda-beda dalam hal menandai rumah Penerima Keluarga Manfaat sehingga bisa mengetahui ini mendapat PKH atau tidak?

“Sebenarnya dari pemerintah pusat itu malah melarang mas dengan pemberian label dirumahnya bahwa ini mendapat bantuan PKH atau tidak takutnya nanti timbul kesenjangan yang semakin jauh masa iya orang yang sudah tidak mampu masih juga dilabel rumahnya itu malah suatu bentuk penghinaan mas hehe, malah pemberian label penerima PKH itu inisiatif dari musdes (musyawarah desa) terkait pemberian label tersebut, katakanlah di desa Sidogemah mengapa tidak ada pemberian label takutnya ada kerusuhan antar tetangga mas ,beda lagi di Desa lain memang ada persetujuan pemberian label agar bantuan benar-benar tepat sasaran”

5. kendala apa saja yang dirasakan saat implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sayung oleh rekan-rekan PPKH itu apa saja selain tadi diatas sebutkan bahwa kurang tepatnya pemberian bantuan PKH di Kecamatan Sayung?

“selain kendala diatas yang saya jelaskan tadi yaitu ada juga kendala tentang PK (Pertemuan Kelompok) nah disini biasanya para pendamping dari kami kesulitan dalam menjalankan tugas PKH, dalam pertemuan kelompok itu membahas tentang, ekonomi, pendidikan, kesehatan info perkembangan perubahan-perubahan kebijakan tentang PKH dll mas, nah kesulitan kami disini yaitu ketika mengadakan PK yang hadir itu hanya sedikit sehingga info yang kami berikan tidak semuanya tersampaikan kepada masyarakat penerima bantuan. Biasanya pertemuan kelompok itu tiap bulan minggu pertama.

Kesulitan yang paling dirasa yaitu bagaimana mengubah mindset masyarakat agar tidak bergantung dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga bisa lebih mandiri nah dalam PK itukan ada materi tentang ekonomi bagaimana cara membeli kebutuhan dengan keinginan, bagaimana cara mengelola keuangan agar seefisien mungkin, nah biasanya kan masyarakat itu kalo dapat ya dihabiskan lalu menunggu bantuan yang

akan datang lagi. Sesuai dengan tujuan PKH yaitu memutus rantai kemiskinan di Indonesia mas”

6. apa penyebab turunnya anggaran tetapi jumlah penerima pada tahap 4 mengalami pelonjakan keluarga penerima manfaat?

“menanggapi tahap ke 4 mengapa mengalami pelonjakan KPM sedangkan anggaran yang didapatkan hanya sekitar 2.881.400.000 dari atasan, sedangkan KPM menjadi banyak itu karena target lansia pada tahap 4 itu berapa juta gitu, eh ternyata lansia di tahap ke 4 itu melebihi target sehingga dari jumlah kpm pada tahap 4 naik menjadi kurang lebih 5 jutaan, makanya untuk tahun 2020 ini kebijakan lansia untuk umur diubah yang dulunya 60 tahun sudah bisa menerima bantuan, sekarang menjadi 70 tahun untuk bisa menerima bantuan PKH, untuk mensiasati penerima yang melonjak kami terpaksa mengurangi penerimaan bantuan agar semua kategori terpenuhi”

7. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan PKH?

“Ada 6 urutan mekanisme setau saya mas yaitu Pembukaan rekening penerima bantuan sosial, sosialisasi dan edukasi, distribusi kartu keluarga Sejahtera (KKS), proses penyaluran bantuan sosial PKH, penarikan dana bantuan sosial PKH, rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan sosial”.

Lampiran 3. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian dengan Narasumber III

**Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian**

**Narasumber : Ibu Ani Sulistiyowati (Pendamping PKH Desa Sodong)**

**Tanggal : 20 Februari 2020**

1. Sejak kapan ibu menjadi anggota PPKH Kecamatan Sayung?

“Saya menjadi anggota PKH di Kecamatan Sayung sejak awal adanya PKH di Kecamatan Sayung yaitu tahun 2012”.

2. Apa tujuannya dibentuknya kelompok-kelompok dalam PKH bu?

“Setiap 15-25 keluarga penerima manfaat, disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH Kecamatan untuk setiap kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan keluarga dan lain sebagainya. Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjangkau kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta, tetapi dapat mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan lain sebagainya yang dilaksanakan, bahwa untuk mempermudah pendampingan kepada penerima manfaat kami buat kelompok-kelompok yang rumahnya saling berdekatan agar mempermudah dan mempercepat ketika ada kumpul-kumpul, dalam satu kelompok ada pembentukan struktur kepengurusan, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Biasanya satu kelompok terdiri dari sepuluh sampai lima belas orang penerima manfaat. Pemilihan ketua kelompok dipilih dengan cara terbuka dan sukarelawan”.

3. Kapan diadakannya pertemuan kelompok bu?

“pertemuan kelompok diadakan tiap awal bulan mas antara minggu pertama dan kedua, nah tiap pertemuan itu membahas materi berbeda-beda

tergantung kita tim pendamping PKH ingin memberikan materi apa yang dibutuhkan penerima manfaat”.

4. Apakah ada kendala dalam melakukan pertemuan kelompok bu?

“kendala mesti ada mas dalam melakukan pertemuan kelompok, missal gini mas saya ketika melakukan pertemuan kelompok itu tidak mesti semuanya hadir mas, yak an semua yang mendapat bantuan tidak semua lansia ada ibu-ibu dari keluarga yang kurang mampu kan mereka juga bekerja jadi tidak bisa mengikuti pertemuan kelompok ya kalo yang tidak hadir sedikit ga papa tetapi kalo yang hadir hanya 5-7 orang saya rugi waktu mas, dengan cara lain saya terkadang menggantinya di hari sabtu/minggu agar semua anggota kelompok bisa hadir mengikuti PK. Jadi itu kendala dalam melakukan pertemuan kelompok”.

5. Setau ibu kalau menentukan penerima PKH itu alurnya bagaimana ya bu?

“alurnya yaitu yang pertama petugas BPS mendata warga dengan menggunakan koesioner, ada banyak isian, missal punya motor berapa, pendapatan perbulan berapa, kondisi rumah seperti apa dll mas.

Yang kedua diolah oleh petugas BPS dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan diteruskan ke tingkat pusat, jadilah data dengan nama DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), kemudian Kemensos mengambil data dari DTKS itu untuk menjadi patokan penerima PKH, dan PKH itu termasuk cluster yang paling bawah (Sangat miskin). Calon KPM yang divalidasi / yang lolos berarti menjadi sah penerima PKH”.

Lampiran 4. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian dengan Narasumber 4

**Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian**

**Narasumber : Ibu Samrotun (Penerima PKH Desa Sodong)**

**Tanggal : 20 Februari 2020**

1. Setahu ibu apa itu PKH bu?

“ ini setau saya ya mas PKH ya bantuan buat keluarga kurang mampu seperi saya ini mas”.

2. Sejak kapan ibu mendapatkan bantuan PKH?

“ saya mendapatkan bantuan sejak tahun 2015 mas”

3. Kapan mengambil bantuan dari PKH bu?

“bantuan dari PKH tiap 3 bulan sekali mas, jadi setahun mendapat 4x bantuan PKH”.

4. Cara mengambil bantuan bagaimana bu?

“ya dibank mas, pakai kartu pemberian dari PKH tapi yang mengambil dibank bukan saya tetapi anak saya”.

5. Di bank mana bu mengambilnya?

“ga tau mas anak saya yang mengambil, kalau tidak salah ya di Bank BRI samping pasar sayung itu mas”.

6. Manfaat apa yang dirasa saat mendapat bantuan ?

“manfaat yang saya rasakan ya itu mas misal seragam sekolah anak saya rusak, dulu saya harus ngumpulin uang dulu buat membelikan seragam yang baru, setelah saya mendapat bantuan PKH kategori anak sd ya uang itu buat kebutuhan hanya untuk anak saya mas, jadi ketika seragam rusak gak harus pusing ngumpulin uang buat membeli seragam jadi langsung saya pakai bantuan yang didapat. Bantuan berapapun tetap saya bersyukur mas daripada ga dapat sama sekali”.

Lampiran 5. Foto bersama Narasumber I



Proses Wawancara dengan Bapak Musafak, coordinator PKH Kabupaten Demak

Lampiran 6. Foto dengan Narasumber 2



Proses Wawancara Koordinator PKH Kecamatan Sayung dan sejumlah anggota PPKH Kecamatan Sayung.

Lampiran 7. Foto dengan Narasumber 3



Proses Wawancara dengan Ibu ani Setyowati selaku pendamping PKH, sebelum mewawancarai penerima bantuan.

Lampiran 8. Foto dengan Narasumber 4



Proses Wawancara dengan Penerima bantuan PKH di Desa Sodong.

Lampiran 9. Foto rumah penerima PKH



Lampiran 10. Foto Kantor Kecamatan Sayung



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Wawan Sulistiyono  
Nim : 1506016005  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 10 November 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Sidorawuh rt07/rw02, Sayung, Demak  
Fakultas/Jurusan : Fisip/Ilmu Politik  
No Hp : 089656128277

### Pendidikan Formal

1. TK MARSUDI RINI
2. SDN SIDOGEMAH 2
3. SMPN 1 KARANGTENGAH
4. SMKN 1 DEMAK

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juni 2020

Tertanda,

Wawan Sulistiyono